



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



Laporan Tahunan

Annual Report 2020

Laporan Tahunan

Annual Report

2020

Tim Penyusun | *Drafter*

Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama

The Center for Research, Promotion, and Cooperation

Pengarah | *Director*

Muhtadi Ganda Sutrisna | *Sekretaris Utama BIG*

Mohamad Arif Syafi'i | *Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar*

Antonius Bambang Wljanarto | *Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik*

Adi Rusmanto | *Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial*

Penanggung Jawab | *Editor in Chief*

Suprajaka | *Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama*

Penyunting | *Editor*

Mone Iye Cornelia Marschiavelli

Achmad Faisal Nurghani

Muhammad Avisena

Kesturi Haryunani Pendar

Kontributor | *Contributor*

Martya Noor Aini M

Yulia Indri Astuty

Endang Purwati

Muhammad Sufwandika

Wijaya

Fanny Zafira Mukti

Niendyawati

Yenny Elfrida H

Syifa Fauziyah

Rochiyatun

Anjarsari Sitoesmi

Slamet Turseno

Fatichatus Istighfarini

Reni Mujiandari

Ratih Destarina

Huswantoro Anggit

Luthfia Rahman

Penerjemah | *Translator*

Dian Purnama

Tata Letak dan Desain | *Layout and Design*

Muhammad Fithrah

Fotografer | *Photographer*

Risa Krisadhi

Devita Remala Sari

Ivan Setiawan

Badan Informasi Geospasial

Geospatial Information Agency

Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 46,

Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16911

Telp: 62-21-8752062, 62-21-8753155

Fax: 62-21-87908988/8753155

Email: info@big.go.id

Website: www.big.go.id

Geoportal: tanahair.indonesia.go.id



Laporan Tahunan
Annual Report
2020

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

4 KILAS KINERJA *ANNUAL HIGHLIGHT*

- 6 Sambutan/*CHAIR'S LETTER*
- 8 Penghargaan/*AWARDS*
- 12 Kilas Kinerja/*ANNUAL HIGHLIGHT*



22 PROFIL *PROFILE*

- 24 Sejarah/*HISTORY OF BIG*
- 28 Visi Misi/*VISION & MISSION*
- 29 Struktur Organisasi/*ORGANIZATIONAL STRUCTURE*
- 30 Profil Pejabat/*OFFICERS PROFILE*



40 SUMBER DAYA MANUSIA/ *HUMAN RESORUCES*

- 42 Profil Sumber Daya Manusia/*HUMAN RESOURCES PROFILE*
- 44 Program Strategis Pengelolaan SDM/
STRATEGIC PROGRAM FOR HR MANAGEMENT
- 51 Pendidikan dan Pelatihan/*EDUCATION AND TRAINING*





54 **PENCAPAIAN KINERJA/** *PERFORMANCE ACHIEVEMENT*

- 66 Penyediaan Data dan Informasi Geospasial Dasar/
PROVISION OF BASIC GEOSPATIAL DATA AND INFORMATION
- 75 Pembinaan dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik/
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THEMATIC GEOSPATIAL INFORMATION
- 84 Penyediaan dan Optimalisasi Infrastruktur Informasi Geospasial/
PROVISION AND OPTIMIZATION OF GEOSPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE



94 **TATA KELOLA ORGANISASI** *ORGANIZATIONAL GOVERNANCE*

- 96 Sistem Pengendalian Internal/
INTERNAL CONTROL SYSTEM
- 96 Pengendalian Gratifikasi/*CONTROL OF GRATIFICATION*
- 97 Nilai Reformasi Birokrasi/*BUREAUCRACY REFORMS*
- 97 Pelayanan Publik/*PUBLIC SERVICES*
- 100 Keterbukaan Informasi Publik/
DISCLOSURE OF PUBLIC INFORMATION
Kerja Sama/*Partnerships*



KILAS KINERJA

ANNUAL HIGHLIGHT

SAMBUTAN

CHAIR'S LETTER



Tahun 2020 merupakan masa yang berat dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Perubahan terjadi di setiap aspek kehidupan kita.

We have passed a challenging and unimaginable time: 2020. The Covid-19 pandemic had a massive impact on human life around the world, including in Indonesia. Changes occur in every aspect of our life.

Covid-19 membawa pengaruh yang besar terhadap Badan Informasi Geospasial (BIG). Berbagai rencana dan program BIG ikut terdampak secara langsung. *Refocusing* dan realokasi anggaran serta pembatasan sosial selama pandemi mengharuskan BIG untuk beradaptasi.

The pandemic has had a significant impact on the Geospatial Information Agency (BIG). It directly affected particular BIG's plans and programs. Refocusing and reallocation of budgets and social restrictions during a pandemic require BIG to adapt.

Penyesuaian diri menjadi hal yang mesti dilakukan di tengah kondisi tersebut agar kinerja tetap terjaga. Apresiasi dan penghargaan kami persembahkan kepada seluruh staf yg menunjukkan komitmen sehingga seluruh target prioritas nasional tercapai kendati berada dalam masa-masa sulit.

Adaptation is inevitable. It was something to be done amid these circumstances to sustain the performances. Our highest recognition goes to all staff who presented high commitment to guarantee all the national priorities targets are achieved despite the most challenging times.

Untuk membantu pencegahan Covid-19, BIG turut berpartisipasi melalui laman **covid19.biggo.id** yang menyajikan peta sebaran Covid-19 dilengkapi dengan analisis-analisis spasial. Selain itu, BIG terlibat aktif dalam upaya percepatan pemulihan pasca bencana salah satunya dengan melakukan pemetaan cepat kebencanaan pada bencana longsor yang terjadi di awal tahun.

To help counteract Covid-19, BIG participates through the covid19.biggo.id, a site dedicated to presents a Covid-19 distribution map equipped with spatial analyzes. Besides, BIG actively aided in efforts to accelerate post-disaster recovery, one of which is by conducting rapid disaster mapping of landslides that occurred at the beginning of the year.

Laporan Tahunan 2020 menjadi rangkuman pelaksanaan tugas dan fungsi BIG serta berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun. Kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat bagi kepentingan nasional. Semoga kita bisa belajar dari pengalaman tahun lalu untuk melakukan perbaikan dan lompatan pada tahun berikutnya.

The 2020 Annual Report summarizes the implementation of BIG's duties and functions. We hope that this report will be of benefit to national interests. Hopefully, we can learn from last year's experience to improve and bounce in the next year.

Akhir kata, izinkan saya menyampaikan selamat kepada BIG atas berbagai pencapaian yang diraih sepanjang 2020. Terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf atas kerja keras dan dedikasinya kepada negeri.

Ultimately, I congratulate BIG on its various achievements it has made throughout 2020. Thank you to all officials and staff for their hard work and devotion to the nation.

Muhtadi Ganda Sutrisna

Plt Kepala Badan Informasi Geospasial
Acting Head of the Geospatial Information Agency



PENGHARGAAN

AWARDS

Peringkat IV "Sangat Memuaskan" Kategori LPNK Pengawasan Kearsipan ANRI

Rank IV "Very Satisfying" in LPNK's Archives Supervision Category

Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan penghargaan untuk pengawasan kearsipan BIG dengan peringkat IV "Sangat Memuaskan". BIG memperoleh nilai 93,40 pada kategori lembaga pemerintah nonkementerian pada rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan di Surakarta, 26 Februari 2020.

The National Archives of the Republic of Indonesia awarded BIG's archive supervision with a rating of IV "Very Satisfying." BIG received 93.40 in the category of non-ministerial government institutions at the National Coordination Meeting for Archives Supervision in Surakarta, February 26, 2020.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Opini LHP BPK

Unqualified opinion from BPK

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019 BIG mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP). Ini merupakan WTP ketiga secara berturut-turut yang diperoleh BIG. BIG terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian untuk menjamin pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel.

Based on the 2019 Central Government Financial Report, BIG received an "Unqualified Opinion". This is the third consecutive "Unqualified Opinion" obtained by BIG. BIG continues to strive to improve the quality of supervision and control to ensure increasingly accountable budget management.

Peringkat 2 Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Ranked 2nd of Action on National Strategy for Corruption Prevention

BIG memperoleh peringkat kedua dalam aksi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencapaian itu diperoleh dengan skor 83,95 persen, berada satu peringkat di bawah BPJS Kesehatan dengan skor 93,74 persen.

BIG was ranked second in the National Strategy for Corruption Prevention by the Corruption Eradication Commission (KPK). BIG obtained this achievement with a score of 83.95 percent, one rank below BPJS Kesehatan with 93.74 percent.

Peringkat 2 Ajang Herudi Technical Committee Award

Ranked 2nd in the Herudi Technical Committee Award

BIG berhasil menduduki peringkat dua pada ajang Herudi Technical Committee Award (HTCA) 2020 yang diselenggarakan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BSN Kukuh S. Ahmad pada Jumat, 6 November 2020.

BIG managed to rank second in the Herudi Technical Committee Award (HTCA) 2020 event organized by the National Standardization Agency (BSN). The award was handed over directly by the Head of BSN Kukuh S. Ahmad on Friday, November 6, 2020

Predikat Badan Publik Informatif

Informative Public Agency

BIG meraih penghargaan sebagai 'Badan Publik Informatif' pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2020 yang diadakan Komisi Informasi Pusat (KIP).

BIG won an award as an 'Informative Public Agency' in the category of State Institutions and Non-Ministry Government Agencies in the 2020 Public Information Openness Award held by the Central Information Commission (KIP).

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Free Area from Corruption (WBK)

BIG menerima predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) "Making Change, Making History" pada Senin, 21 Desember 2020 secara virtual.

BIG received the title of corruption-free Region (WBK) in 2020 from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Kemenpan-RB) in the Appreciation and Awards event for the Integrity Zone towards a Corruption-Free Area (WBK) and a Clean Serving Bureaucratic Area (WBBM) "Making Change, Making History" on Monday, December 21, 2020, virtually.

Apresiasi Tim Teknis Penetapan atas Maritim

Appreciation of the Technical Team for Maritime Determination

Kementerian Luar Negeri memberikan penghargaan kepada BIG atas keterlibatan BIG dalam tim teknis penanganan batas maritim Indonesia periode 2015-2019. Apresiasi diberikan di Jakarta, 27 Agustus 2020.

The Ministry of Foreign Affairs awarded BIG for BIG's involvement in the technical team for handling Indonesia's maritime boundaries for the 2015-2019 period. Minister of Foreign Affairs gave appreciation in Jakarta, August 27, 2020.

Anugrah Indriya Mandrawa Award



Anugrah Indriya Mandrawa Award

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) memberikan penghargaan Anugerah Apresiasi Infriya Mandrawa Award kepada Badan Informasi Geospasial atas peran aktifnya dalam penggunaan data dan informasi penginderaan jauh pada 27 Januari 2021.

Penghargaan tersebut diberikan atas pertimbangan kinerja BIG dalam mengelola dan memanfaatkan data penginderaan jauh dengan baik. BIG telah mengolah data penginderaan jauh dari LAPAN selama 2013 menjad citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dan telah mendistribusikannya kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

The National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) awarded the Infriya Mandrawa Appreciation Award to the Geospatial Information Agency for its active role in the use of remote sensing data and information in January 27, 2021. The award was given considering BIG's performance in managing and making good use of remote sensing data. BIG has processed remote sensing data from LAPAN since 2013 into orthorectified high-resolution remote sensing satellite imagery and has distributed it to ministries/agencies and local governments.

Indeks Kepuasan Masyarakat "A"



Community Satisfaction Index "A."

Indeks kepuasan masyarakat BIG pada 2020 berada pada interval mutu pelayanan A (sangat baik) menurut kategori Kemenpan RB. BIG berhasil meraih angka 3,61 dari skala 1-4. Angka tersebut meningkat dari indeks kepuasan masyarakat pada 2019, yaitu 3,34.

The BIG community satisfaction index in 2020 is in the service quality interval A (excellent) according to the Kemenpan RB category. BIG managed to score 3.61 on a scale of 1-4. This number increased from the community satisfaction index in 2019, which was 3.34.

Sertifikasi ISO 20000:2018



ISO 20000:2018 Certification

Peningkatan kualitas layanan teknologi informasi Badan Informasi Geospasial mendapatkan sertifikasi dari British Standar Institution (BSI). BSI memberikan sertifikasi ISO 20000:2018 perihal IT *Service Management System* kepada Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG) BIG pada 8 Februari 2021.

Selama ini teknologi informasi menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan program-program strategis BIG. Keberadaan data center yang dimiliki BIG sangat penting untuk menopang kebijakan pemerintah seperti Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia.

Improving the quality of information technology services The Geospatial Information Agency is certified by the British Standards Institution (BSI). BSI awarded ISO 20000:2018 certification regarding IT Service Management System to the BIG Geospatial Information Management and Dissemination Center (PPIG) on February 8, 2021.

So far, information technology has become the backbone of the implementation of BIG's strategic programs. A data center owned by BIG is significant to support government policies such as the One Map and One Indonesia Data Policy.

Penghargaan 112 Inovasi Indonesia 2020



112 Indonesian Innovation Awards 2020

Tiga karya inovasi teknologi Badan Informasi Geospasial mendapat apresiasi dari Business Innovation Center (BIC), serta masuk ke dalam "112 Inovasi Indonesia Tahun 2020. Inovasi tersebut antara lain; Analisis Spasial Penyebaran dan Penanganan Covid-19 di Indonesia; Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial Melalui Ina-geoportal; dan Geoportal Palapa Sebagai Geoportal Simpul Jaringan.

Three technological innovations of the Geospatial Information Agency received appreciation from the Business Innovation Center (BIC) and were included in the "112 Indonesian Innovations of 2020. These innovations include; Spatial Analysis of the Spread and Handling of Covid-19 in Indonesia; Sharing Geospatial Data and Information Through Ina-geoportal; and the Palapa Geoportal as a Network Node Geoportal.

KILAS KINERJA

ANNUAL HIGHLIGHT

JANUARI

Tim SRC BIG Petakan Lokasi Terdampak Banjir dan Longsor di Bogor

(9/1) BIG terjunkan Tim Satuan Reaksi Cepat (SRC) untuk memetakan lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Bogor. Peta yang di hasilkan dimanfaatkan untuk perencanaan pemulihan pascabencana. Kampung Banar di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor lenyap disapu banjir bandang dan longsor.

Refleksi Tahunan, Kepala BIG Ingatkan Pekerjaan Rumah

(28/1) Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin memimpin kegiatan "Refleksi Tahunan". Ia mengingatkan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan BIG. Pemanfaatan CORS, Tides Gauges, dan peta dasar skala besar menjadi target utama. Kebijakan Satu Peta (KSP) dilanjutkan dengan menambah tema-tema yang mendukung kemaritiman dan mitigasi bencana.

JANUARY

BIG'S SRC TEAM Map Location Affected by Floods and Landslides in Bogor

(9/1) BIG sent a Rapid Response Unit (SRC) Team to map the locations affected by the flood and landslide disaster in Bogor. The team produced a map used for post-disaster recovery planning. Kampung Banar in Nanggung Village, Nanggung District, Bogor Regency disappeared after being swept away by flash floods and landslides.

Annual Reflextions, Head of BIG Remind Homework

(28/1) Head of BIG Hasanuddin Zainal Abidin led the "Annual Reflection". He reminded BIG that there is homework to be done immediately. The main targets are the utilization of CORS, Tides Gauges, and large-scale base maps. The One Map Policy (KSP) was continued by adding themes that support maritime and disaster mitigation.



FEBRUARI

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Percepatan KSP

(6/2) Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas membahas Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP). Presiden memberikan beberapa arahan, antara lain penyelesaian batas definitif seluruh desa dan kelurahan; akses data-data melalui satu geoportal; memanfaatkan peta-peta KSP untuk perencanaan pembangunan, sinkronisasi, dan penyelesaian konflik penggunaan wilayah. Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin meminta jajarannya untuk bersiap.

Menparekraf Bahas Peluang Pemanfaatan Informasi Geospasial dalam Pariwisata

(20/2) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama bertemu dengan Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin. Ia membahas peluang pemanfaatan informasi geospasial untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. Peran BIG akan sangat strategis untuk membantu memahami sekaligus menyusun Rencana Induk Pariwisata Nasional Terpadu yang ditargetkan rampung sebelum ulang tahun ke -75 Republik Indonesia.

FEBRUARY

President Jokowi Leads the KSP Acceleration Limited Meeting

(6/2) President Joko Widodo chaired a Limited Meeting to discuss the One Map Policy's Acceleration. The President gave several directions, including the settlement of definitive boundaries for all villages and sub-districts; access to data through a geoportal; using the KSP maps for development planning, synchronization, and resolution of conflicts over the use of areas. Head of BIG Hasanuddin Zainal Abidin asked his staff to prepare.

Minister of Tourism and Creative Economy Discusses Opportunities for Using Geospatial Information in Tourism

(20/2) Minister of Tourism and Creative Economy Wishnutama met with Head of BIG Hasanuddin Zainal Abidin. He discussed the opportunity to use geospatial information to improve tourism in Indonesia. BIG's role will be very strategic to help understand and at the same time prepare an Integrated National Tourism Master Plan, targeted to be completed before the 75th anniversary of the Republic of Indonesia.



Joint Calibration GNSS Equipment BIG-JUEPM Malaysia

(25/2) BIG melaksanakan Joint Calibration GNSS Equipment bersama Jawatan Ukur Pemetaan (JUPEM) Malaysia. Kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam penyelesaian *Outstanding Boundary Problem* (OBP) Sektor Timur segmen sungai Sinapad Sesai. Alat-alat terkalibrasi pada kegiatan ini selanjutnya akan digunakan pada survei bersama penyelesaian OBP Sektor Timur segmen sungai Sinapad Sesai yang ditargetkan selesai pada akhir 2020.

Joint Calibration GNSS Equipment BIG-Jupem Malaysia

(25/2) BIG held a GNSS Equipment Joint Calibration with the Malaysian Mapping Bureau (JUPEM). This activity is the first step in resolving the *Outstanding Boundary Problem* (OBP) in the East Sector of the Sinapad river segment. BIG and JUPEM will then use the joint survey's calibrated tools to complete the OBP East Sector of the Sinapad Sesai river segment, which is targeted for completion by the end of 2020.

MARET

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Terbaru Bidang Informasi Geospasial Disepakati

(3/3) BIG menyepakati Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terbaru bidang informasi geospasial (IG) dalam Konsensus KKNI. Pemufakatan dilakukan melalui diskusi panel antara Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang IG dan akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Hasil dari Konsensus KKNI IG ini akan dijadikan dasar untuk merevisi Peraturan Kepala BIG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kompetensi Kerja di Bidang IG.

MARCH

The Latest Indonesian National Qualification Framework in the Field of Geospatial Information was Agreed

(3/3) BIG agrees to the latest Indonesian National Qualifications Framework (KKNI) in geospatial information in the KKNI Consensus. The agreement was made through a panel discussion consists of the National Professional Certification Agency (BNSP), the National Accreditation Committee (KAN), the Ministry of Manpower, Professional Certification Institutions (LSP), and academics from several universities in Indonesia. The KKNI IG Consensus results will be the basis for revising the Head of BIG Regulation Number 7 of 2017 concerning Work Competence in the Field of Geospatial Information.



Indonesia Submit Landas Kontinen Tambahan di Utara Papua

(4/3) Terhubung dalam Tim Landas Kontinen Indonesia, Badan Informasi Geospasial (BIG) diwakili Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Mohamad Arief Syafi'i dan tim turut hadir dalam penyampaian submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut segmen utara Papua. Submisi disampaikan di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan (Commission on the Limit of the Continental Shelf/CLCS) Bangsa-Bangsa (PBB) di markas besar PBB, New York.

Indonesia Submit Additional Continental Shelf in Northern Papua

(4/3) Joined in the Indonesian Continental Shelf Team, the Geospatial Information Agency (BIG) - represented by Deputy for Basic Geospatial Information Mohamad Arief Syafi'i - submit latest found on Indonesia's continental shelf outside the 200 nautical miles of the northern segment of Papua. Submissions were delivered through the United Nations (UN) Commission on the Limit of the Continental Shelf (CLCS) at United Nations Headquarters, New York.

BIG Gelar Forum Standardisasi IG: Implementasi dan Manfaat SNI 7925:2019

(5/3) Munculnya SNI 7925:2019 diharapkan dapat mendorong pelestarian lahan gambut. Melalui SNI tersebut, setiap pihak kini memiliki standar acuan yang dapat digunakan bersama untuk memetakan lahan gambut berskala 1:50.000 berbasis citra penginderaan jauh. Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin menyatakan, dengan adanya SNI 7925:2019 pemerintah tidak lagi sendirian dalam memetakan lahan gambut. SNI 7925:2019 mendorong *participatory mapping* dari masyarakat dan mitra pemerintah.

Big Holds Geospatial Information Standardization Forum

The emergence of SNI 7925: 2019 encourages the conservation of peatlands. Through this SNI, stakeholders now have a reference standard to map peatlands at a scale of 1: 50,000 based on remote sensing images. Head of BIG Hasanuddin Zainal Abidin stated that with SNI 7925: 2019, the government is no longer alone mapping peatlands. SNI 7925: 2019 encourages participatory mapping of the community and government partners.

Wamen ATR/BPN Temui Kepala BIG Bahas KSP

(11/3) Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra menemui Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin. Menurut Surya, Kementerian ATR/BPN perlu meningkatkan kerja sama dengan BIG. Banyak pekerjaan di Kementerian ATR/BPN yang beririsan dengan pekerjaan BIG. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin menyampaikan Percepatan KSP dapat dilaksanakan dengan mengajak mitra pemerintah, termasuk swasta untuk turut berpartisipasi.

Deputy Minister Of ATR/BPN Meet the Head ff Big Discussing KSP

(11/3) Deputy Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) / National Land Agency (BPN) Surya Tjandra met with Head of BIG Hasanuddin Zainal Abidin. According to Surya, the ATR/BPN Ministry needs to increase cooperation with BIG. Many programs in the Ministry of ATR/BPN intersect with BIG's. During the meeting, the Head of BIG Hasanuddin Zainal Abidin said that the KSP acceleration could be carried out by inviting government partners, including the private sector, to participate.



BIG Rilis Peta Analisis Risiko Pandemi COVID-19

(21/3) BIG merilis peta analisis sementara risiko pandemi COVID-19 di wilayah Jakarta. Penentuan indeks risiko dilakukan berdasarkan parameter-parameter dari aspek bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Peta dapat diakses melalui alamat <https://covid19.big.go.id/>

BIG Terapkan WFH-WFO

(31/3) BIG akhirnya menerapkan pembagian pola kerja *Work From Home* dan *Work from Office* untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan BIG. Hal tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Pembatalan Bepergian dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Badan Informasi Geospasial.

AGUSTUS

BIG-BPPT Sepakat Melaksanakan Survei Landas Kontinen di Barat Sumatera

(11/8) BIG dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menandatangani kontrak kerja sama "Penyelenggaraan Survei Landas Kontinen Indonesia di Barat Pulau Sumatera". Survei yang akan dilakukan BIG-BPPT bertujuan mengumpulkan data guna mengajukan klaim perpanjangan landas kontinen ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam hal ini United Nations-Commission on the Limits of Continental Shelf (UN-CLCS).

Big Releases Covid-19 Pandemic Risk Analysis Map

(21/3) BIG released a temporary analysis map of the risk of the COVID-19 pandemic in the Jakarta area. The risk index is determined based on the parameters of the hazard, vulnerability, and capacity aspects. Users can access maps through the address <https://covid19.big.go.id/>.

Big Applies Work from Home

(31/3) To prevent the spread of Covid-19, BIG finally divided its worker into two groups: work from home (WFH) and work from office (WFO). This was stipulated in Handbill Number 1 of 2020 concerning the Implementation of Official Work and Travel Restriction in the Context of Preventing the Spread of the Corona Virus Disease (Covid-19) Outbreak in Geospatial Information Agency.

AUGUST

BIG-BPPT Agree to Carry Out a Continental Shelf Survey in West Sumatra

(11/8) BIG and the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) signed a cooperation contract "Conducting Indonesian Continental Shelf Survey in West Sumatra Island". The survey that BIG-BPPT will conduct aims to collect data to submit claims for extension of the continental shelf to the United Nations (UN), in this case, the United Nations-Commission on the Limits of Continental Shelf (UN-CLCS).



Hasanuddin Zainal Abidin Lepas Jabatan Kepala BIG

(31/8) Setelah empat tahun menakhodai Badan Informasi Geospasial (BIG), tiba waktunya bagi Hasanuddin Zainal Abidin mengucapkan salam perpisahan. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kepala BIG, Hasan berencana kembali mengajar di ITB.

Hasanuddin Zainal Abidin Resigned

(31/8) After four years in charge of the Geospatial Information Agency (BIG), it was time for Hasanuddin Zainal Abidin to say goodbye. After no longer serving as Head of BIG, Hasan plans to return to teaching at ITB.



SEPTEMBER

Bimbingan Teknis Pelaksanaan KSP untuk Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Papua

(16/9) BIG menggelar bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua. Bimtek ini diadakan sebagai bagian dari strategi nasional (stranas) pencegahan korupsi. Bimtek ini diikuti perwakilan sekretaris daerah Provinsi Papua, Tim Stranas PK KPK, perwakilan kepala Bappeda kabupaten dan kota di Papua, perwakilan kepala Dinas Lingkungan Hidup di Papua, perwakilan kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan di Papua, perwakilan inspektur di Papua, Tim IGT Perizinan Terintegrasi PPIT IGT, dan Tim World Research Institute Perwakilan Provinsi Papua.

SEPTEMBER

Working Group on The Implementation of The KSP or The Plantation of Oil Palm in Papua

(16/9) BIG held a Working Group to implement the One Map Policy (KSP) for licensing oil palm plantations in Papua. This Working Group was part of the national strategy to prevent corruption.

Survei Landas Kontinen Barat Pulau Sumatra dimulai

(27/9) Kapal Baruna Jaya 1 memulai misi Survei Landas Kontinen Barat Pulau Sumatra. Survei bertujuan untuk memperoleh data batimetri yang akan digunakan dalam pembuktian *Investigator Ridge* sebagai kepanjangan alamiah (*natural prolongation*) dari daratan Sumatera, dan posisi *foot of slope* (FOS) yang digunakan dalam delimitasi batas terluar landas kontinen barat Pulau Sumatra.

The Sumatra Island West Continental Shelf Survey Commenced

(27/9) The Baruna Jaya 1 Ship started the mission of the West Continental Shelf Survey of Sumatra Island. The survey aims to obtain bathymetric data to prove Investigator Ridge as a natural prolongation of the mainland of Sumatra and the foot of slope (FOS) used in delimiting the outer boundary of the western continental shelf of Sumatra Island.



OKTOBER

Seminar Nasional Geomatika

(15/10) Seminar Nasional Geomatika mengambil tema "Informasi Geospasial untuk Inovasi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan". Tema tersebut dikembangkan dalam delapan sub tema, yaitu IG dalam Mengatasi Pandemi Covid- 19; Pembangunan Berkelanjutan; Inovasi Teknologi Geospasial; Perencanaan Tata Ruang; Teknologi Percepatan Pemetaan Skala Besar; Kebijakan Satu Peta; Pemetaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil; serta Pemetaan Batas Wilayah.

OCTOBER

National Geomatics Seminar

(15/10) The National Geomatics Seminar takes the theme "Geospatial Information for Innovation to Accelerate Sustainable Development." BIG developed the theme in eight sub-themes: Geospatial Information in Overcoming the Covid-19 Pandemic; Sustainable Development; Geospatial Technology Innovation; Spatial Planning; Large Scale Mapping Acceleration Technology; One Map Policy; Mapping of Marine, Coastal and Small Islands; and Mapping of Territorial Boundaries.

Peringatan Hari Geospasial

(19/10) Puncak peringatan Hari Informasi Geospasial (HIG) yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-51 Badan Informasi Geospasial (BIG) dilaksanakan secara virtual pada Senin, 19 Oktober 2020. Peringatan HIG tahun ini mengusung tema `Satu Peta, Satu Data, Satu Nusantara`. Tema tersebut dipilih untuk meneguhkan komitmen BIG dalam penyelenggaraan IG yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.

Geospatial Day Commemoration

(19/10) The peak of the commemoration of Geospatial Information Day (HIG), which coincided with celebrating the 51st anniversary of the Geospatial Information Agency (BIG), was held virtually on Monday, 19 October 2020. This year's HIG commemoration carries the theme "One Map, One Data, One Nusantara". BIG reinforces its commitment to implementing Geospatial Information which refers to one geospatial reference, one standard, one database, and one geoportal.



Pertemuan UNGEGN Asia Sout-East Division ke-8

(27/10) Pertemuan United Nations Group of Experts on Geographical Names Asia South East Division (UNGEGN ASE Division) ke-8 menyepakati konsep *platform* kolaboratif, penyusunan peta regional, basis data dan gazeter regional, *generic terms*, serta webinar tentang bahasa lokal di wilayah ASE. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) Badan Informasi Geospasial (BIG) Mohamad Arief Syafii bertindak sebagai Chairman UNGEGN ASE Division periode 2018-2022 sekaligus ketua delegasi Indonesia.

8th UNGEGN Asia Sout-East Division Meeting

(27/10) The 8th United Nations Group of Experts on Geographical Names Asia South East Division (UNGEGN ASE Division) meeting agreed on the concept of a collaborative platform, preparation of regional maps, regional databases and gazetteers, generic terms, and webinars on local languages in the ASE region. Deputy for Basic Geospatial Information (IGD) of the Geospatial Information Agency (BIG) Mohamad Arief Syafii acted as Chairman of the UNGEGN ASE Division for the 2018-2022 period as well as the Head of the Indonesian delegation.

NOVEMBER

9th Plenary Meeting UNGGIM AP

(3/11) BIG menjadi tuan rumah penyelenggaraan 9th Plenary Meeting UNGGIM AP. Dalam pertemuan tersebut peserta mendapat pemahaman global dan regional mengenai topik terkini mengenai informasi geospasial, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.

NOVEMBER

9th Plenary Meeting Of UNGGIM AP

(3/11) BIG hosted the 9th Plenary Meeting of UNGGIM AP. During the meeting, participants received a global and regional understanding of the latest geospatial information topics, especially in handling the Covid-19 pandemic.

FGD Strategi Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar

(12/11) BIG menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) membahas strategi percepatan dalam penyediaan peta dasar skala besar 1:5.000. Peta ini nantinya digunakan sebagai landasan Menyusun Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Acara ini diikuti perwakilan dari Kementerian ATR/BPN serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

FGD Strategy For The Acceleration of Large-Scale Base Map Provision

(12/11) BIG held a Focus Group Discussion (FGD) to discuss accelerated strategies in providing large-scale base maps of 1: 5,000. This map will later be a basis for Compiling a Detailed Spatial Planning Map (RDTR). Representatives from the Ministry of ATR/BPN and the National Aeronautics and Space Agency (Lapan) attended the meeting.



Bhumandala Award 2020: Menuju Pengelolaan Informasi Secara Spasial

(27/11) Gelaran Bhumandala Award 2020 menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan simpul jaringan, baik pada level kementerian, lembaga, pemerintah daerah tingkat provinsi, dan pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten. Hal tersebut terlihat dari peningkatan kualitas data dan pemanfaatan simpul jaringan dalam mendukung kerja pemerintahan. 2022 sekaligus ketua delegasi Indonesia.

Bhumandala Award 2020: Towards Spatial Information Management

(27/11) The Bhumandala Award 2020 shows an increase in network node management quality at the ministry, agency, provincial-level local government, and city/district level local governments. There is a vast improvement in data quality and utilization of network nodes in supporting government work.



DESEMBER

Temu Nasional Penerbitan Gazeter Nasional 2020

(8/12) Serangkaian kegiatan pengumpulan nama rupabumi dan penelaahan nama rupabumi telah dilaksanakan BIG bersama K/L terkait, pemda, akademisi, serta pakar toponimi. Daftar nama rupabumi yang telah ditelaah, selanjutnya ditetapkan menjadi nama rupabumi baku dan dicantumkan dalam gazeter nasional agar dapat digunakan sebagai rujukan nasional.

DECEMBER

National Gathering Of The 2020 National Gazetteer Publishing

(8/12) BIG has carried out a series of topographical names collection and review of topographical names with related Ministries / Agencies, local government, academics, and toponymy experts. The reviewed list of topographical terms was then determined to be the common topographical name and entered in the national gazetteer as a national reference.

Pejabat Struktural BIG Tanda Tangan Perjanjian Kinerja 2021

(15/12) Menjelang tahun anggaran 2021, BIG telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dokumen tersebut merupakan penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan dengan disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja 2021 ditandatangani oleh pejabat struktural di seluruh pusat teknis BIG.

Big's Officer Signed Performance Agreement 2021

(15/12) Towards 2021, BIG has drafted a Performance Agreement Document for 2021. This document is an assignment to implement programs/activities accompanied by performance indicators. All BIG's Officer signed The 2021 Performance Agreement.



PROFIL *PROFILE*

SEJARAH

HISTORY OF BIG



1948

Upaya memetakan wilayah Indonesia telah dilakukan sejak lama. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, terdapat sebuah Badan bernama Permante Kaarterings-Comissie (Komisi Tetap untuk Pemetaan) yang menjalankan fungsi pemetaan. Pada 17 Januari 1948, badan tersebut dibubarkan dan dibentuk Raad en Directorium voor het Meet en Kaarteerwezen in Nederlands Indies (Dewan dan Direktoratium untuk Pengukuran dan Pemetaan Hindia Belanda).

Attempts to map Indonesian territory have been carried out for a long time. During the Dutch East Indies' colonialism era, there was a body called Permante Kaarterings-Comissie (Permanent Commission for Mapping), which carried out the mapping function. On January 17th, 1948, the agency was dissolved, and the Raad en Directorium Voor het Meet en Kaarteerwezen in Nederlands Indies (Council and Directory for Measurement and Mapping of the Netherlands Indies) was formed.

1949

Setelah diakuinya kedaulatan Republik Indonesia pada 1949, dibentuk Dewan dan Direktoratium Pengukuran dan Penggambaran Peta yang memiliki pola organisasi yang sama seperti bentukan Hindia Belanda. Dewan bertugas membuat kebijakan dan pengambilan keputusan sementara Direktoratium melaksanakannya.

After the recognition of the sovereignty of the Republic of Indonesia in 1949, the Council and Directory of Measurement and Drawing Maps were formed, which had the same organizational pattern as the Dutch East Indies. The Council is in charge of making policies and making decisions while the Directory carries them out.



1964

Di luar Dewan tersebut, Biro Ekonomi dan Keuangan membentuk Panitia Pembuatan Atlas Sumber-sumber Kemakmuran Indonesia yang bertugas menunjang rencana pembangunan nasional. Pada 1964, berdasarkan Keputusan Kabinet Kerja No. Aa/D57/1964 yang ditandatangani Wakil Perdana Menteri II Chaerul Saleh, status panitia tersebut ditingkatkan menjadi Badan Atlas Nasional.

Outside the Council, the Bureau of Economics and Finance has formed a Committee for the Making of an Atlas of the Sources of Indonesian Prosperity to support the national development plan. In 1964, based on the Decree of the Working Cabinet No. Aa / D57 / 1964 signed by Deputy Prime Minister II Chaerul Saleh, the committee's status upgraded to the National Atlas Agency.

1965

Sementara itu, Presiden Soekarno menilai kinerja Dewan dan Direktorium lamban dan fungsi koordinasinya tidak berjalan. Untuk itu, ia pun kemudian membubarkan Dewan dan Direktorium. Melalui Keppres No.263 Tahun 1965 dibentuk Komando Survei dan Pemetaan Nasional (Kosurtanal) dan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional (Desurtanal). Hingga peristiwa Gerakan 30 September terjadi, Desurtanal dan Kosurtanal belum beroperasi sebagaimana mestinya.

Meanwhile, President Soekarno assessed that the Council and Directory's performance was slow and that their coordination function was not working. For that, he then dissolved the Council and Directory. Through Presidential Decree No.263 of 1965, the National Survey and Mapping Command (Kosurtanal) and the National Survey and Mapping Council (Desurtanal) were established. Until the September 30th Movement took place, Desurtanal and Kosurtanal had not been operating effectively.

1969

Pemerintah pusat melihat perlu adanya koordinasi dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas survei dan pemetaan yang efektif dan efisien. Selain itu, dalam rangka penertiban aparatur pemerintahan, keberadaan badan-badan yang melakukan kegiatan survei dan pemetaan perlu ditinjau kembali. Akhirnya muncul keputusan agar Desurtanal, Kosurtanal, dan Badan Atlas Nasional dilebur dalam suatu badan koordinasi. Atas dasar itulah kemudian terbit Keppres No.63 Tahun 1969 yang menjadi dasar berdirinya Badan Survei dan Koordinasi Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

The central government sees the need to coordinate activities and implement practical and efficient survey and mapping tasks. In order to control the government apparatus, the existence of agencies that carry out survey and mapping activities needs to be reviewed. Finally, a decision emerged so that Desurtanal, Kosurtanal, and the National Atlas Agency were merged into a coordinating body. On this basis, the Presidential Decree No.63 of 1969 was issued, which became the basis for establishing the National Mapping Survey and Coordination Agency (Bakosurtanal).



1998

Pada 17 Juni 1998, struktur organisasi Bakosurtanal disempurnakan melalui Keppres No. 87 Tahun 1998 sehingga menjadi suatu lembaga pemerintah nondepartemen yang bernaung dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

On June 17th, 1998, Bakosurtanal's organizational structure was refined through Presidential Decree No. 87 of 1998 so that it became a non-departmental government institution under the auspices of and directly responsible to the president.

2011

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbit Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. melalui PP No.94 Tahun 2011, dibentuk Badan Informasi Geospasial (BIG), sebuah badan yang menjadi tulang punggung Indonesia dalam mewujudkan tujuan UU Informasi Geospasial dalam menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan; mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; serta mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

During the reign of President Susilo Bambang Yudhoyono, Law no. 4 of 2011 concerning Geospatial Information. Through Government Regulation No.94 of 2011, the Geospatial Information Agency (BIG) was formed. It became the backbone in carrying out the objectives of the Geospatial Information Law: ensuring the availability of access to accountable geospatial information; realizing the efficient and effective administration of geospatial information through cooperation, coordination, integration, and synchronization; and encouraging the use of geospatial information in government administration and various aspects of community life.

2015

Pada mulanya BIG berkoordinasi dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Namun, dengan terbitnya PP No.127 Tahun 2015, BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Perubahan tersebut lahir dengan tujuan untuk mengoptimalkan penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional.

BIG berwenang dalam penyelenggaraan informasi geospasial, khususnya untuk informasi geospasial dasar yang terdiri atas jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Jaring kontrol geodesi terdiri dari jaring kontrol horizontal, jaring kontrol vertikal, dan jaring kontrol gaya berat. Peta dasar terdiri dari peta rupa bumi Indonesia (RBI), peta lingkungan pantai Indonesia, dan peta lingkungan laut nasional (LLN). Peta dasar ini menjadi referensi untuk penyusunan informasi geospasial tematik di Indonesia. Informasi geospasial tematik yang memuat tema tertentu diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, kelompok, atau perseorangan. Dalam hal ini, BIG mengisi tema-tema yang belum diselenggarakan pihak lain. Dengan kata lain, tugas utama BIG dalam informasi geospasial tematik adalah menetapkan kebijakan mengenai standardisasi data dan informasi geospasial.

Keberhasilan BIG dapat terlihat ketika seluruh peta tematik yang dibuat oleh berbagai instansi sektoral, badan usaha, kelompok, atau perorangan telah mengacu pada informasi geospasial dasar yang disediakan BIG. Dengan adanya satu acuan informasi geospasial dasar, tumpang tindih informasi ruang kebumihuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerusakan lingkungan dapat dihindari. Penggunaan satu acuan ini juga memudahkan dalam pertukaran informasi geospasial antar instansi dan integrasi dalam perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah yang terhubung dalam jaringan informasi geospasial nasional (JIGN).

Initially, BIG coordinated with the Ministry of Research, Technology, and Higher Education. However, with PP No.127 of 2015, BIG was coordinated by the Minister, who is responsible for national development planning. This change was born to optimize the provision, management, and utilization of geospatial information in supporting national development planning.

BIG has the authority to provide geospatial information, especially for basic geospatial information consisting of geodetic control nets and base maps. Geodetic control nets cover horizontal control nets, vertical control nets, and gravity control nets. The base map consists of a map of the Indonesian earth (RBI), a map of the Indonesian coastal environment (LPI), and a national marine environment map (LLN). This base map becomes a reference for the thematic geospatial information in Indonesia. Thematic geospatial information containing specific themes is held by central government agencies, local governments, business entities, groups, or individuals. In this case, BIG fills in themes that other parties have not held. In other words, BIG's main task in thematic geospatial information is to establish policies regarding the standardization of geospatial data and information.

BIG aims all thematic maps created by various sectoral agencies, business entities, groups, or individuals to have referred to the basic geospatial information provided. Stakeholders can avoid legal uncertainty and environmental damage created by the overlapping information on land use regarding basic geospatial information. This one reference also facilitates the exchange of geospatial information between agencies and integration in development planning from the central to regional levels connected to the national geospatial information network (JIGN).

VISI MISI

VISION & MISSION



VISI

VISION

Menjadi Pelopor dan Pembina Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Andal

To become a pathfinder and mentor of reliable geospatial information management.



MISI

MISSION

Menyediakan Informasi Geospasial Dasar dan Mengintegrasikan Informasi Geospasial Wilayah Nasional

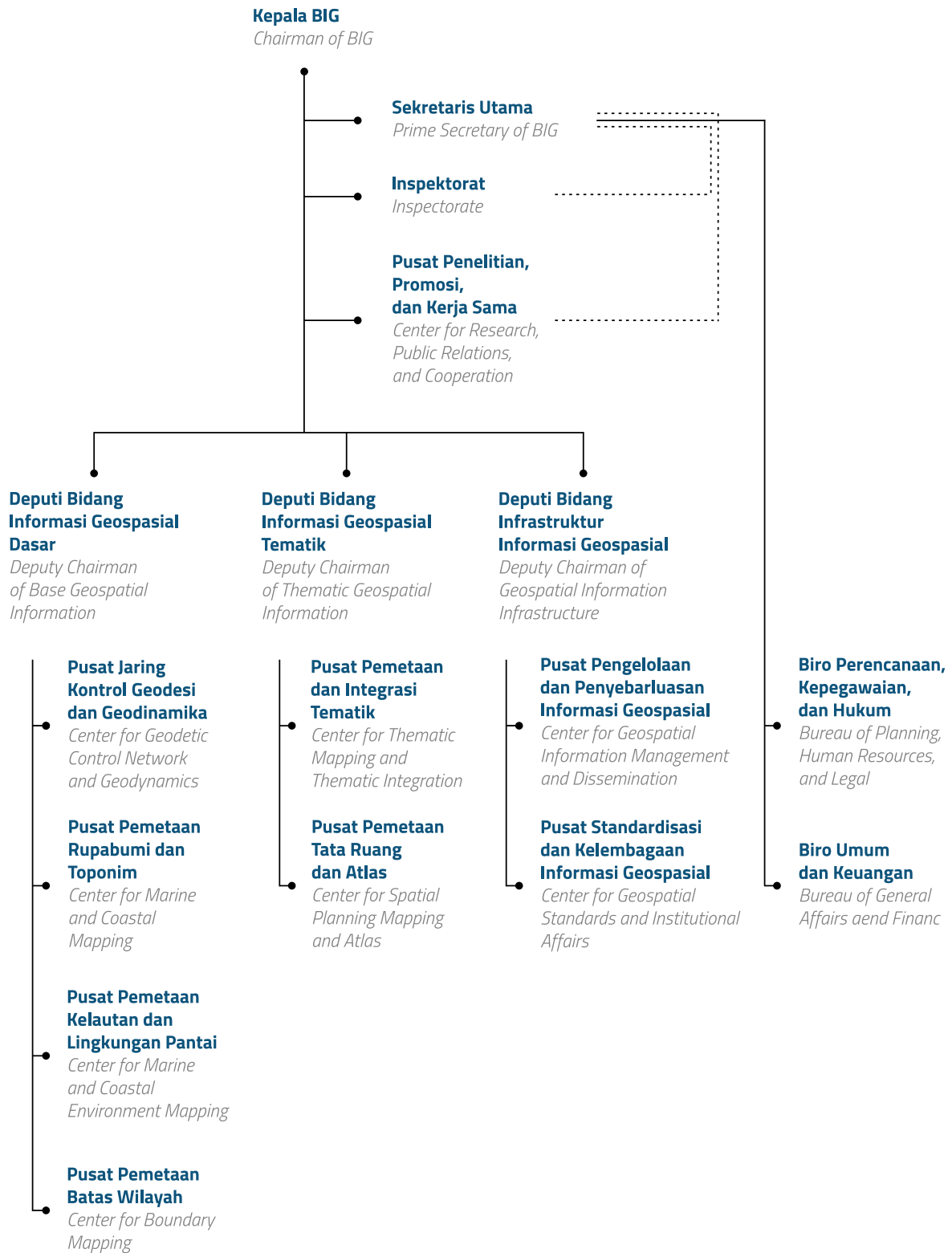
Providing Basic Geospatial Information and Integrating National Geospatial Information

Meningkatkan Sinergi Proaktif melalui Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial Dasar dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional

Increasing Proactive Synergy through Development of Basic Geospatial Information Infrastructure in the Implementation of National Geospatial Information

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE





Muhtadi Ganda Sutrisna

Sekretaris Utama

PRIME SECRETARY OF BIG



Mohamad Arief Syafi'i

**Deputi Bidang Informasi
Geospasial Dasar**

*DEPUTY CHAIRMAN OF BASE
GEOSPATIAL INFORMATION*



**Antonius Bambang
Wijanarto**

**Deputi Bidang Informasi
Geospasial Tematik**

*DEPUTY CHAIRMAN OF THEMATIC
GEOSPATIAL INFORMATION*



Adi Rusmanto

**Deputi Bidang Infrastruktur
Informasi Geospasial**

*DEPUTY CHAIRMAN FOR GEOSPATIAL
INFORMATION INFRASTRUCTURE*

Gatot Haryo Pramono

Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika

HEAD OF CENTER FOR GEODETIC CONTROL NETWORKS AND GEODYNAMICS



Ade Komara Mulyana

Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim

HEAD OF CENTER FOR TOPOGRAPHIC MAPPING AND TOPONYM



Yosef Dwi Sigit Purnomo

Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai

HEAD OF CENTER FOR MARINE AND COASTAL MAPPING



Astrit Rimayanti

Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah

HEAD OF CENTER FOR REGIONAL BOUNDARY MAPPING





Lien Rosalina

Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai

HEAD OF CENTER FOR THEMATIC MAPPING AND THEMATIC INTEGRATION



Khafid

Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas

HEAD OF CENTER FOR SPATIAL PLANNING MAPPING AND ATLAS



Rachman Rifai

Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

HEAD OF CENTER FOR GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT AND DISSEMINATION



Sumaryono

Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial

HEAD OF CENTER FOR GEOSPATIAL STANDARDS AND INSTITUTIONAL AFFAIRS

Habib Subagio

Inspektur
INSPECTOR



Ibnu Sofian

**Kepala Biro Perencanaan,
Kepegawaian, dan Hukum**

*HEAD OF BUREAU OF PLANNING,
HUMAN RESOURCES, AND LEGAL*



Ali Nor Hidayat

**Kepala Biro Umum dan
Keuangan**

*HEAD OF BUREAU OF GENERAL AFFAIRS
AND FINANCE*



Suprajaka

**Kepala Pusat Penelitian, Promosi,
dan Kerja Sama**

*HEAD OF CENTER FOR RESEARCH, PUBLIC RELATIONS,
AND COOPERATION*





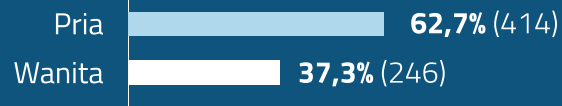
SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

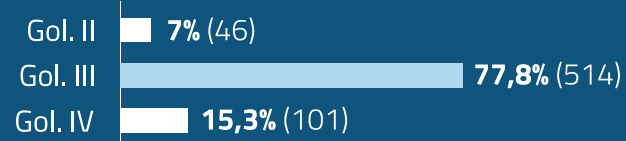
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES PROFILE

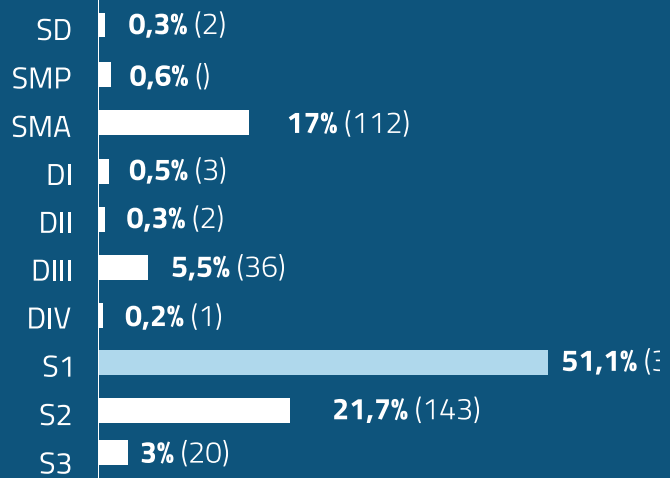
Berdasarkan Jenis Kelamin



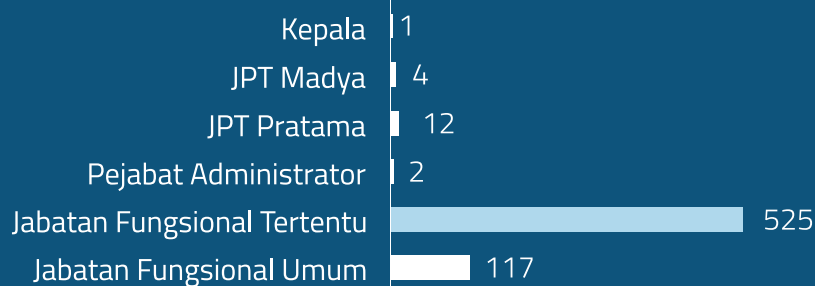
Berdasarkan Golongan



Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan Jabatan



PROGRAM STRATEGIS PENGELOLAAN SDM

STRATEGIC PROGRAM FOR HR MANAGEMENT

Selama 2020 BIG menjalankan beberapa program strategis dalam pengelolaan SDM BIG antara lain meliputi Penyederhanaan Birokrasi, *Agent of Change*, dan Manajemen Talenta.

In 2020 BIG implemented several strategic HR management programs, including Simplification of the Bureaucracy, Agent of Change, and Talent Management.

Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan program yang dilatarbelakangi arahan Presiden Joko Widodo yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Secara internal, ada beberapa poin yang membuat penyederhanaan birokrasi menjadi solusi yang perlu diambil oleh BIG.

BUREAUCRATIC SIMPLIFICATION

The simplification of the bureaucracy is a program based on President Joko Widodo, outlined in the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (Menpan RB) Number 28/2019 concerning Equalization of Administrative Functional Positions. Internally, several points make simplifying the bureaucracy is the best solution BIG need to be taken.

a. Sudut pandang pengelolaan manajemen organisasi BIG

Pada 2017, Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika pernah mengusulkan seluruh staf berada di bawah eselon 2. Eselon 3 diusulkan berfungsi mengkoordinasi, bukan sebagai atasan. Hal tersebut dianggap akan lebih efektif karena alur proses pekerjaan tidak sesuai dengan pembagian struktur organisasi.

A. BIG ORGANIZATIONAL MANAGEMENT PERSPECTIVES

In 2017, the Center for Geodetic Control Network and Geodynamics once proposed that all staff be under echelon 2. They asked to put Echelon 3 to coordinating, not as superior. The reason was that the work process flow is not according to the distribution of the organizational structure.

Pada 2018, Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim mengusulkan unit kerja eselon 3 baru karena Bidang Pemetaan Rupabumi Skala Besar memiliki target yang meningkat sementara proses bisnisnya telah berubah menyesuaikan kondisi yang ada.

In 2018, the Center for Topographic Mapping and Toponym proposed a new echelon 3 unit because the Large Scale Topographic Mapping Division has an increasing target while its business processes have changed according to existing conditions.

Selain itu, terdapat banyak kasus terkait dinamika kerja di unit eselon 3 dan 4 seperti beban kerja yang tidakimbang seperti yang terjadi pada Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas. Pada pusat teknis tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban pekerjaan tidak berimbang antara Bidang Tata Ruang dengan bidang lain. Diakui oleh Kepala PPTRA saat itu, beberapa pegawai dari bidang lain dipekerjakan utk mengerjakan pekerjaan Bidang Tata Ruang. Pada Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) ketimpangan pekerjaan terjadi ketika ada pemetaan desa dengan target sangat tinggi.

Besides, there are many cases related to work dynamics in echelon 3 and 4 units. For example, in the Center for Atlas and Spatial Mapping (PPTRA), we found the workload between different divisions was not well balanced. At that time, the Head of PPTRA admitted that He hired several employees from other divisions to work in the Spatial Planning Sector. At the Center for Regional Boundary Mapping duty, inequality occurs when village mapping has very high targets.

Dari contoh-contoh di atas, terlihat bahwa sekat-sekat birokrasi pada unit kerja yang lebih rendah menimbulkan permasalahan organisasi dan menimbulkan dampak kepada kinerja. Unit Kerja eselon 3 dan 4 cenderung berdiri dan berjalan mandiri. Seharusnya bisa lebih cair sehingga *silos mentality* tidak terbentuk.

Sementara itu hampir semua unit teknis menggunakan metode pembentukan PIC kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaannya. PIC kegiatan lebih menguasai operasional kegiatan dan bahkan di beberapa unit menjadi *leader* bagi rekan-rekannya.

b. Sudut pandang pengelolaan SDM BIG

Komposisi pendidikan pegawai BIG dalam 10 tahun ke depan diproyeksikan akan didominasi oleh S2. Lulusan S3 juga bertambah. Banyak pegawai yang merupakan lulusan luar negeri. Mereka harus diberi ruang/otoritas sehingga merasa dihargai karena kepakarannya. Hal tersebut akan memberikan pengaruh yang positif dan kontribusi yang nyata.

Pengembangan karir akan berfokus pada pembinaan jabatan fungsional dengan memberikan ruang bagi pegawai dengan tanggung jawab lebih. Dalam hal ini, struktur organisasi akan menjadi kontraproduktif saat jumlah talent yang tersedia lebih banyak dibandingkan jabatan struktural yang dapat diisi.

Di sisi lain, pengembangan dan inovasi melalui tanggung jawab dapat lahir sehingga jabatan fungsional level tinggi dapat berfungsi sebagai *team leader*. Hal tersebut akan menghindari kasus-kasus di mana kontribusi jabatan fungsional madya-utama sangat minim dibanding jabatan fungsional di level yang lebih rendah.

c. Sudut pandang kultur organisasi BIG

BIG tak pernah menjadi organisasi yang murni birokrat. BIG adalah organisasi dengan kultur *science organization*. Kultur *scientist* ini bisa berkembang jika organisasi dikembangkan berbasis keahlian. Pengembangan organisasi *professional bureaucracy based on expertise*, akan lebih tepat bagi BIG.

Di luar BIG, muncul tuntutan agar BIG menjadi lebih agile, adaptif, dan modern mengikuti perkembangan kebutuhan dan teknologi informasi geospasial. Oleh karena itu, pola birokrasi yang lebih cepat, tanggap, dan responsif adalah jawabannya.

From the examples above, we can see that the bureaucratic barriers in the lower work units cause organizational problems and impact performance. Echelon 3 and 4 Units tend to be up and running independently. It should be more fluid, so a silo mentality is not formed.

Meanwhile, almost all technical units assigned a person in charge (PIC). PICs have more control over operational activities and even become leaders for their colleagues in some departments.

B. HR MANAGEMENT PERSPECTIVES

The employee's composition by its education level in the next ten years is projected to be dominated by Masters. The number of Doctoral graduates also increased. Many employees are graduates from abroad. We must give them space/authority so that they feel appreciated for their expertise. It will have a positive influence among the employees and concrete contribution.

Career development will focus on fostering functional positions by providing space for employees with more responsibilities. In this case, the organizational structure will be counterproductive when the available talents are more than the structural positions available.

On the other hand, development and innovation through responsibility can emerge so that high-level functional positions will function as team leaders. Furthermore, it will avoid cases where the employee's contribution with intermediate-high rank is minimal compared to the employees at lower levels.

C. BIG ORGANIZATIONAL CULTURE PERSPECTIVES

BIG has never been a purely bureaucratic organization. BIG is an organization with a science organization culture. This scientist culture will develop if the organization is formed based on expertise. The development of a professional organization based on expertise would be more appropriate for BIG.

From time to time, BIG demands to be more agile, adaptive, and modern in keeping with the development of the needs and technology of geospatial information. Therefore, a bureaucratic model that is faster and more responsive is the answer.

d. Tantangan penyederhanaan birokrasi

Penyederhanaan birokrasi yang dilakukan menimbulkan beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Pertama, kebutuhan akan *Leader* dan *manager* yang sangat handal. Oleh sebab itu, program Pengembangan Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai *manager* lini operasional pelaksanaan kegiatan sekaligus leader yang mumpuni menjadi prioritas utama.

Selain itu, pengelola SDM yang juga handal untuk mengelola karir di dalam jabatan fungsional dan mampu melahirkan *future leaders* sesuai kebutuhan organisasi.

Pola Kerja yang berubah menyesuaikan dengan struktur organisasi yang semakin *flat*. Pola kerja yang selama bertahun-tahun sangat birokratis dan kaku harus diubah. Hal itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Percepatan dapat dilakukan oleh *leader* masing-masing unit kerja.

e. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi

Sampai saat ini, berikut yang sudah dilaksanakan oleh BIG dalam penyederhanaan birokrasi:

1. Menyampaikan surat Kepala BIG Nomor B-31.3/KA-BIG/OT.01.02/12/2019 kepada Menteri PANRB perihal pemetaan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi tanggal 31 Desember 2019.
2. Melakukan koordinasi dengan tim Kemenpan RB terkait surat tersebut pada poin 1. Pada proses ini dilakukan verifikasi data oleh tim Kemenpan RB dengan hasil verifikasi dan persetujuan penyetaraan jabatan.
3. Memperoleh Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/193/M.SM.02.00/2020 tanggal 08 April 2020 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Informasi Geospasial;
4. Melakukan proses penyederhanaan struktur organisasi, berkoordinasi dengan tim Deputi Tata Laksana Kemenpan RB;
5. Melakukan pembahasan dan harmonisasi peraturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan Kemenpan RB dan Kemenkumham;
6. Mengesahkan Peraturan BIG nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; dan

D. CHALLENGES OF BUREAUCRATIC SIMPLIFICATION

The simplification of the bureaucracy that has been carried out has created several challenges in its implementation— first, the need for very reliable leaders and managers. Therefore, a high-ranking officers' development program needs to be directed to form a qualified leader and operational manager.

HR managers are also reliable in managing careers in functional positions and can produce future leaders according to the organization's needs.

Changing work patterns adjust to the increasingly flat organizational structure. The work pattern that had been very bureaucratic and rigid for years had to be changed. It takes a long time. The leader of each work unit can do acceleration.

D. CHALLENGES OF BUREAUCRATIC SIMPLIFICATION

To date, BIG has done the following in simplifying the bureaucracy:

1. *Delivered Head of BIG's Letter Number B-31.3 / KA-BIG / OT.01.02 / 12/2019 to the Menpan-RB regarding the mapping of the position of simplifying the bureaucracy on December 31, 2019.*
2. *Coordinated with the KemenpanRB team regarding the letter in point 1. In this process, the KemenpanRB team performs data verification with the results of verification and equalization approval.*
3. *Obtained the Letter of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number B / 193 / M.SM.02.00 / 2020 dated April 8, 2020, concerning Approval of Equalizing Administrative Positions into Functional Positions within the Geospatial Information Agency;*
4. *Performed the process of simplifying the organizational structure, in coordination with the Deputy of Management of the Ministry of National Development Planning;*
5. *Discussed and harmonized regulations on Organizational Structure and Work Procedures with KemenpanRB and Kemenkumham;*
6. *Ratified BIG Regulation number 4 of 2020 concerning the Organization and Work Procedure of the Geospatial Information Agency; and*

7. Melakukan Pengalihan jabatan melalui pelantikan dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pada tanggal 31 Agustus 2020. Sebanyak 50 jabatan administrator dialihkan ke jabatan fungsional. Jumlah Jabatan yang dialihkan sebanyak 22 pengawas dan 28 administrator (94% dari total jumlah jabatan administrasi sebelum penyederhanaan).

f. Peluang di masa depan

Penyederhanaan birokrasi telah membuka peluang bagi BIG untuk dapat membangun budaya organisasi yang lebih modern dan profesional. Dalam kondisi penyederhanaan birokrasi ini beberapa imaji positif di masa depan yang nampak antara lain,

- Struktur organisasi sangat ramping dan *flat*, sehingga hubungan atasan dan bawahan lebih egaliter.
- Fokus karir pada jabatan fungsional sehingga lebih mengedepankan kompetensi dan *expertise* seorang ASN di bidangnya.
- Pola komunikasi tidak terkotak pada 1 unit kerja, tetapi pada keterkaitan antar kegiatan (komunikasi paralel dan meminimalisir *silos mentality*).

Agen Perubahan

Agen perubahan (*Agent of change/AOC*) adalah individu/ sekelompok individu yang terlibat dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikannya (Permenpan-RB Nomor 25/2020). AOC memiliki peran utama sebagai katalisator bagi organisasi dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan, penguatan nilai integritas, pengembangan budaya kerja dan cara kerja adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0, serta inisiasi kegiatan yang mendukung visi reformasi birokrasi BIG.

AOC bekerja secara sistematis dengan arahan dari pimpinan perubahan (*change leader*) serta selaras dengan visi reformasi birokrasi BIG. Penetapan personal sebagai pemimpin dan agen perubahan ditetapkan oleh Kepala BIG.

Beberapa agenda AOC yang termasuk rencana kerja untuk tahun 2020-2024, antara lain kampanye identitas, *green energy campaign*, titik kumpul, konseling pegawai, dan *sharing session* AOC.

7. *Transferred positions through inauguration and re-appointment to functional roles on August 31, 2020. A total of 50 administrator positions have been transferred to functional roles. The number of posts assigned was 22 supervisors and 28 administrators (94% of the total administrative posts before the simplification).*

F. FUTURE OPPORTUNITIES

Simplification of the bureaucracy has opened up opportunities for BIG to build a more modern and professional organizational culture. In this condition of bureaucratic simplification, several positive images of the future arise, among others,

- *The organizational structure is very lean and flat so that the relationship between superiors and subordinates becomes egalitarian.*
- *Career focus on functional positions so that it puts forward a civil servant's competence and expertise in their field.*
- *Communication patterns are not locked up into one work unit but on the linkages between activities (parallel communication and minimizing silo mentality).*

AGENT OF CHANGE

Agent of Change (AOC) is an individual/group of individuals involved in planning change and implementing it (Permenpan-RB Number 25/2020). AOC has a primary role as a catalyst for organizations in changing their unit's mindset and works culture through the development and strengthening of values to increase commitment and implementation of change, strengthening the integrity, developing work culture and adaptive work methods in welcoming the 4.0 industrial revolution, and initiating activities that support BIG's vision of bureaucratic reform.

AOC works systematically with direction from change leaders. It aligned with BIG's vision of bureaucratic reform. The Head of BIG determines the appointment of personnel as leaders and agents of change.

Several AOC agendas include work plans for 2020-2024, including identity campaigns, green energy campaigns, gathering points, employee counseling, and AOC sharing sessions.



a. *Sharing Session AOC*

Pada awal 2020, AOC menggelar *sharing session*. Hasil dari pertemuan tersebut adalah substansi utama yang menjadi DNA *roadmap* reformasi birokrasi BIG 2020–2024 yakni visi organisasi dipahami oleh seluruh lini di BIG, organisasi yang tanggap terhadap perubahan yang cepat, sinergi antar unit kerja, tidak ada sekat birokrasi yang kaku, PNS profesional sekaligus pakar di bidang informasi geospasial, serta organisasi modern berbasis teknologi informasi.

Hal tersebut kemudian disampaikan dalam rapat pimpinan yang membahas *roadmap* reformasi birokrasi BIG. Lahirlah visi reformasi birokrasi BIG “yaitu menjadi organisasi modern yang *agile* dan mengutamakan sinergi dalam rangka membangun profesionalitas SDM bidang informasi geospasial berkelas dunia untuk mewujudkan pelayanan prima dalam era revolusi industri 4.0.”

A. *SHARING SESSION OF AOC*

In early 2020, AOC held a sharing session. The meeting unfolds primary substances that became the DNA roadmap for BIG bureaucratic reform 2020-2024. It includes the vision of the organization being understood by all levels of employees, organizations that are responsive to rapid change, the synergy between work units, no rigid bureaucratic boundaries, professional civil servants-cum-experts in geospatial information, and modern organizations based on information technology.

It was then conveyed in a leadership meeting discussing the BIG bureaucratic reform roadmap. The vision of BIG bureaucratic reform was born “that is to become a modern, agile organization that prioritizes synergy to build world-class human resource in the field of geospatial information to accomplish excellent service in the era of industrial revolution 4.0.”

b. Refleksi Tahunan

Kegiatan refleksi tahun 2019 merupakan kegiatan untuk mengevaluasi capaian-capaian yang diperoleh BIG pada tahun 2019 yang disampaikan oleh para pejabat tinggi utama dan madya di lingkungan BIG kepada para pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan pada awal tahun 2020. Pada kegiatan tersebut disampaikan penghargaan-penghargaan kepada unit dan pegawai yang berprestasi, baik dalam kinerja maupun di luar kedinasan. Pada acara ini diharapkan para pegawai BIG dapat memahami tugas, fungsi dan capaian dari tiap-tiap unit di BIG, serta menjangking aspirasi dari para pegawai untuk di tindaklanjuti oleh pimpinan.

B. ANNUAL REFLECTION

The 2019 reflection activity is an activity to evaluate BIG's achievements in 2019, which the leading and middle high officials convey to employees. In this activity, BIG gave awards to units and employees who performed well, both in performance and service. The Head of BIG hoped every employee could understand each unit's duties, functions, and achievements. High-rank officers tried to capture the aspirations of employees.



c. Leaders Academy

Untuk meningkatkan kapasitas pemahaman reformasi birokrasi dan perubahan budaya organisasi pada tahun 2020, BIG menyelenggarakan *Leaders Academy* dengan mengundang tokoh yang kompeten pada bidangnya seperti Bapak Eko Prasjo untuk perubahan organisasi dan tokoh inspiratif perubahan Ibu Susi Pudjiastuti. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan seluruh pimpinan dan *Agent of Change* (AoC) dan disiarkan melalui kanal media sosial BIG. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada seluruh pegawai BIG tentang perubahan organisasi dan memimpin perubahan tersebut sebagai bagian dari memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan pegawai di BIG.

C. Leaders Academy

To increase the capacity for understanding bureaucratic reform and changes in organizational culture in 2020, BIG organized the Leaders Academy by inviting competent figures in their fields such as Eko Prasjo for organizational change and the inspirational figure for change, Susi Pudjiastuti. This event involves all leaders and Agents of Change (AoC) and is broadcast through BIG's social media channel. We intended to provide insight to all BIG employees about organizational change and lead these changes to all levels of employees at BIG.

d. AoC di Level Teknis

Di level unit kerja para AoC terpilih telah menjalankan beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap unit kerja, antara lain webinar Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan yang mengundang Martha Tilaar dan Aretha Aprilia, Program "Jumat Saatnya Berbagi Ilmu dan Bimbingan", Refleksi 2020 Pusat Pemetaan dan Lingkungan Pantai, dan Rencana Aksi Agen Perubahan Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama Tahun 2020.

D. AOC AT THE TECHNICAL LEVEL

At the work unit level, the selected AOCs have carried out several activities tailored to the needs of each work unit, including a webinar on Increasing the Capacity of Women's Human Resources, which invited Martha Tilaar and Aretha Aprilia, the "Friday Time to Share Knowledge and Guidance" Program, Reflection 2020 of the Center for Marine and Coastal Environment Mapping, and the 2020 Center for Research, Promotion, and Cooperation Action Plan for Change Agents.

Manajemen Talenta

Manajemen Talenta merupakan program strategis pengelolaan SDM BIG yang bertujuan untuk membangun manajemen karir pegawai yang lebih baik dan modern. Program ini hendak mempersiapkan pemimpin masa depan yang kompeten dan dapat menjadi teladan baik dari segi prestasi kerja maupun karakternya.

TALENT MANAGEMENT

Talent Management is a strategic program for HR management aiming to build a better and modern employee career management. This program seeks to prepare future leaders who are competent and can be role models in terms of work performance and character.

Pada 2020, BIG telah melaksanakan sosialisasi "Kebijakan Nasional tentang Manajemen Talenta" sebagai upaya meningkatkan kesadaran bagi para pimpinan. Sosialisasi dilakukan oleh tim dari Kemenpan-RB dihadiri seluruh pejabat pimpinan tinggi BIG dan AoC. Kegiatan ini membuka wawasan dan menyiapkan BIG untuk mengimplementasikan manajemen talenta.

AOC works systematically with direction from change leaders. It aligned with BIG's vision of bureaucratic reform. The Head of BIG determines the appointment of personnel as leaders and agents of change.

BIG pun telah menyusun Standar Kompetensi Jabatan untuk JPT di BIG. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh jabatan yang ada di BIG (316 jabatan). Hasil evaluasi telah selesai dan disampaikan kepada Kemenpan RB pada Desember 2020 untuk memperoleh surat persetujuan dan rekomendasi kelas jabatan baru.

BIG has also compiled Job Competency Standards for high-rank posts at BIG. The evaluation was carried out on all positions in BIG (316 positions). The evaluation results have been completed and submitted to KemenpanRB in December 2020 to obtain a letter of approval and recommendation for a new class of office.

Melanjutkan kegiatan asesmen pegawai yang telah dimulai pada 2015, pada 2020 BIG melaksanakan asesmen terhadap 94 orang untuk level 4. Pelaksanaan asesmen kompetensi akan terus dilanjutkan bertahap hingga seluruh pegawai terpetakan. *Profiling* kompetensi SDM BIG akan mulai dilaksanakan pada 2021.

Continuing the employee assessment activities that began in 2015, in 2020, BIG carried out assessments of 94 people for level 4. The implementation of competency assessments will continue in stages until all employees are mapped. BIG HR competency profiling will begin in 2021.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

EDUCATION AND TRAINING

Pandemi Covid-19 memaksa BIG untuk beradaptasi dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan informasi geospasial. Kelas luring yang biasanya dilaksanakan di Cibinong dibatasi untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Untuk itu, BIG memindahkan kelas luring menjadi kelas daring melalui webinar bertajuk Geospatial *Sharing Session* dan Geospatial Webinar *Series*. Pelaksanaan dua program online tersebut berjalan dengan baik ditandai dengan minat peserta yang mengikuti pelaksanaan keduanya. Berikut diklat yang dilaksanakan sepanjang 2020.

The Covid-19 pandemic forced BIG to adapt to implementing geospatial information education and training programs. To support the prevention of the spread of Covid-19, BIG limited the offline classes usually held in Cibinong. Thus, BIG had moved the offline course to an online course through webinars entitled Geospatial Sharing Session and Geospatial Webinar Series. The two online programs' implementation went splendidly, indicated by the participants who took part in the implementation of both. The following are the training that was carried out throughout 2020.

No.	Metode/Method	Topik/Topic
1	Diklat Luring/Offline Course	Migrating to ArcGIS Pro Technical
2	Diklat Luring/Offline Course	Fungsional Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli/Expert level of functionla mapping surveyor
3	Diklat Luring/Offline Course	Diklat SIG Kota Palangkaraya/GIS Courses in Palangkaraya
4	Diklat Luring/Offline Course	Sistem Informasi Geospasial Dasar/Basic GIS
5	Diklat Luring/Offline Course	Diklat SIG Kementerian Pertanian/GIS Course for Ministry of Agriculture
6	Diklat Luring/Offline Course	Pelatihan SIG Dasar Pemkab Labuhan Batu/Basic GIS Course for Labuhan Batu Regency
7	Diklat Luring/Offline Course	Upskilling & Reskilling Guru SMK BMT1/Upskilling & Reskilling Training for SMK BMT1's Teachers
8	Diklat E-learning/E-learning	Pelatihan Sistem Informasi Geografis Dasar berbasis E-learning (September)/Basic GIS Course (September)
9	Diklat E-learning/E-learning	Pelatihan Sistem Informasi Geografis Dasar berbasis E-learning (November)/Basic GIS Course (November)
10	Geospatial Sharing Session (GSS)	Pemanfaatan Quantum GIS dan QGIS Cloud untuk Publikasi Informasi Geospasial/Utilization of Quantum GIS and QGIS Coud for Publication
11	GSS	Tutorial "Informasi Geografis untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Geografi/Geospatial Information to Improve Geography Teacher Competence

Pada 2020, BIG merevisi modul diklat. Adapun modul diklat yang direvisi adalah Kebijakan Informasi Geospasial, Konsep Sistem Manajemen Basis Data SIG, Pengenalan Perangkat Lunak SIG, Georeferencing dan Transformasi Koordinat, Digitasi Layar, Manipulasi Data Geospasial, Pengelolaan Basis Data Atribut, Penelusuran Basis Data Geospasial, Geoprocessing, Penyajian Informasi Geospasial, Tata Letak Peta, serta Pengukuran Posisi Berbasis Satelit.

In 2020, BIG revised the training module on several topics, such as Geospatial Information Policy, GIS Database Management System Concepts, Introduction to GIS Software, Georeferencing and Coordinate Transformation, Screen Digitization, Geospatial Data Manipulation, Attribute Database Management, Geospatial Database Tracking, Geoprocessing, Geospatial Information Presentation, Map Layout, and Satellite-Based Position Measurement.





PENCAPAIAN KINERJA

*PERFORMANCE
ACHIEVEMENT*

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

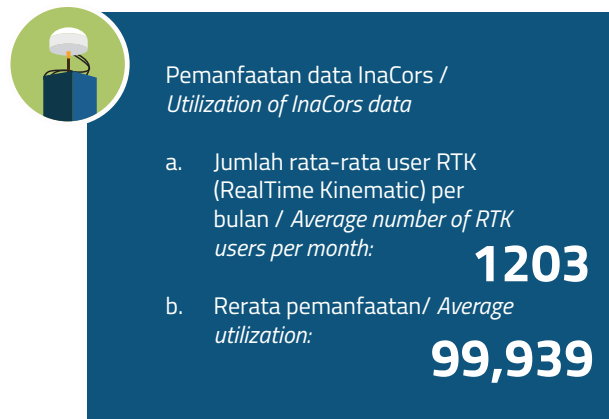
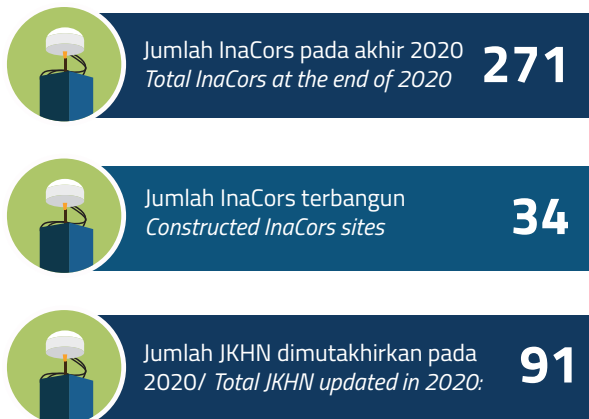
PROVISION OF BASIC GEOSPATIAL DATA AND INFORMATION

Informasi geospasial dasar (IGD) adalah informasi geospasial yang berisi objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. BIG menyelenggarakan data dan informasi geospasial dasar yang dibutuhkan dalam kegiatan survei dan pemetaan nasional agar seluruh informasi geospasial yang dihasilkan memiliki referensi geospasial yang tunggal sesuai dengan amanat Kebijakan Satu Peta, termasuk di dalamnya mendukung kegiatan lain seperti mitigasi kebencanaan dan reforma agraria.

Basic Geospatial information (IGD) is geospatial information containing an object that can be seen or measured directly from the earth's physical appearance. It has not changed in a relatively long time. BIG organizes basic geospatial data and information needed in national survey and mapping activities. All geospatial information generated has a single geospatial reference following the One Map Policy mandate, including supporting other activities such as disaster mitigation and agrarian reform.

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN JARING KONTROL HORIZONTAL DAN GEODINAMIKA

CONSTRUCTION AND MANAGEMENT OF HORIZONTAL CONTROL NETWORK AND GEODYNAMIC



PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN JARING KONTROL HORIZONTAL DAN GEOID

CONSTRUCTION AND MANAGEMENT OF HORIZONTAL CONTROL NETWORK AND GEOID

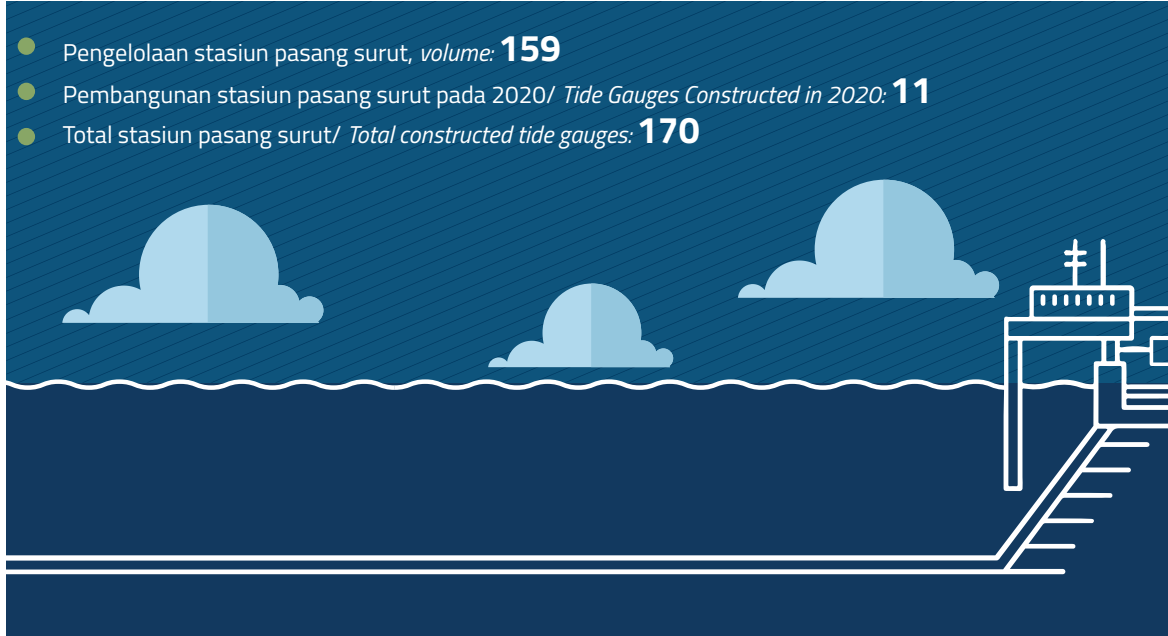
Pengolahan Model Geoid / Geoid Model Processing

Pulau/ Island	Jumlah Titik Validasi / Total Validation Points	Min (cm)	Rata-rata / Average (cm)	Max (cm)	Standar Deviasi / Standard Deviation (cm)
Sulawesi	53	-60,1	-10,5	41,3	22,4
Sumatera	26	-8,38	21,4	51,3	17,3
Bali	184	-38,3	-0,3	31,1	10,3
Kalimantan	265	-23,7	-2,51	-2,5	6,61
Jawa	186	-12,8	0,03	30,4	5,08

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN JARING KONTROL VERTIKAL DAN PASANG SURUT

CONSTRUCTION AND MANAGEMENT OF VERTICAL AND TIDE GAUGES

- Pengelolaan stasiun pasang surut, *volume*: **159**
- Pembangunan stasiun pasang surut pada 2020/ *Tide Gauges Constructed in 2020*: **11**
- Total stasiun pasang surut/ *Total constructed tide gauges*: **170**



PERAPATAN GROUND CONTROL POINT *DENSIFICATION OF GROUND CONTROL POINT*

Paket Pekerjaan <i>Work Package</i>	Target Output/ <i>Output Target</i>	Waktu Pelaksanaan/ <i>Execution Time</i>	Pencapaian Target <i>Target Achievement</i>
Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan sekitarnya/ <i>West Sulawesi, South Sulawesi Provinces and surroundings</i>	237 titik/ <i>points</i>	21 September 2020 s.d 19 November 2020	100%
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan sekitarnya/ <i>South East Sulawesi Province and surroundings</i>	150 titik/ <i>points</i>	11 September 2020 s.d 09 November 2020	100%
Wilayah Provinsi Maluku dan sekitarnya/ <i>Maluku Province and surroundings</i>	605 titik/ <i>points</i>	10 September 2020 s.d 23 Desember 2020	100%

DATA GEOSPATIAL TERMUTAKHIR

UPDATED GEOSPATIAL DATA



Lokasi akuisisi LIDAR dan pemotretan udara pada 2020/
Locations of LIDAR acquisition and digital aerial photography in 2020:

- Tebing Tinggi
- Seputih
- Kikim
- Siabu
- Solok Bulik
- Tideng Pale

Jumlah keseluruhan area /
Total areas:

4,903 km²

Index of Lidar acquisition locations and digital aerial photography 2020



Indeks Pekerjaan Akuisisi 2020/Acquisition Work Index 2020

CITRA SATELIT TEGAK RESOLUSI SANGAT TINGGI/ ORTHOREKTIFIKASI

VERY HIGH-RESOLUTION VERTICAL SATELLITE IMAGERY /ORTHORECTIFIATION



Total proyek orthorektifikasi/
Total Orthorectification Project:

13

Total luasan/ *Total area:*

534,697,854 km²

Orthorectificated Very High-Resolution Vertical Satellite Imagery 2020



Legends
 CITRA ORTHOREKTIFIKASI

WILAYAH					
NO.	AREA	NO.	AREA	NO.	AREA
1	Riau	5	Sumatera Barat	9	Kalimantan Barat
2	Jambi	6	Kepulauan Riau	10	Nusa Tenggara Barat
3	Sumatera Selatan	7	Kalinantan Timur	11	Sulawesi Utara
4	Sumatera Utara	8	Kalimantan Selatan	12	Papua

Lokasi Pekerjaan Orthorektifikasi CSRT Tahun 2020
 /Location of the CSRT Orthorectification Work 2020

PREPARE SATELLITE IMAGERY FOR WORKING MAPS

PREPARE SATELLITE IMAGERY FOR WORKING MAPS



Target titik kontrol di wilayah Kalimantan/ GCP for Kalimantan:

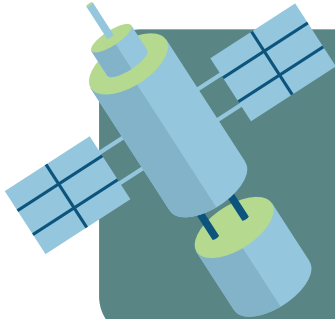
345 Points

Target titik kontrol di wilayah Sumatera/ GCP for Sumatera:

310 Points

LIDAR BATIMETRI

LIDAR BATHYMETRY

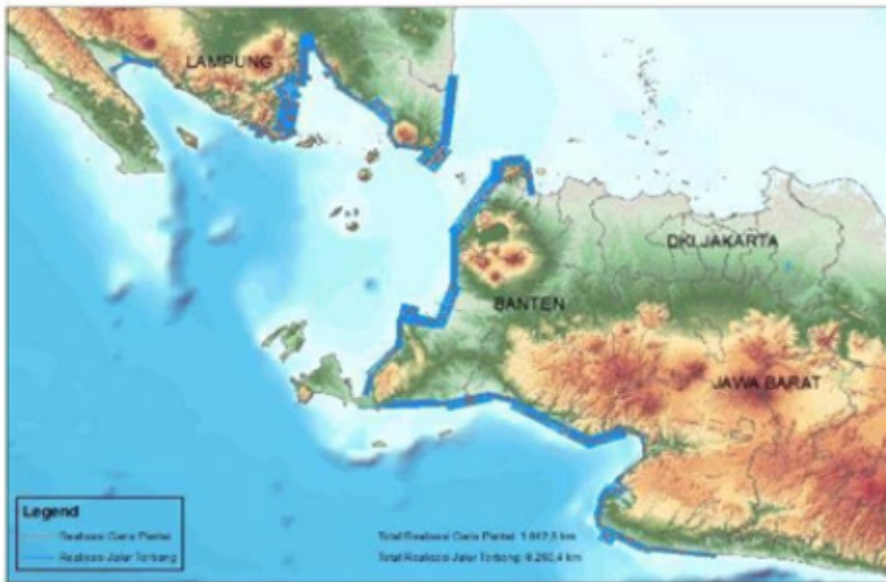


Total garis pantai yang dihasilkan/
Total Coastline Generated:

1,000 km

Lokasi Survei Lidar Batimetri pada 2020/
Location of Lidar Bathymetry Survey in 2020:

- Pesisir Selat Sunda
- Sukabumi
- Pesisir Lampung



Area Akuisisi Lidar Batimetri/Acquisition Area of Lidar Bathymetry

SURVEI VALIDASI PULAU

ISLAND VALIDATION SURVEY

No	Lokasi/Location	Jumlah Indikasi/ Total Indication Point	Hasil Validasi/ Validation Results
1	Nusa Tenggara Timur	40 titik/points	26 titik/points
2	Nusa Tenggara Barat	32 titik/points	27 titik/points

SURVEI LANDAS KONTINEN INDONESIA

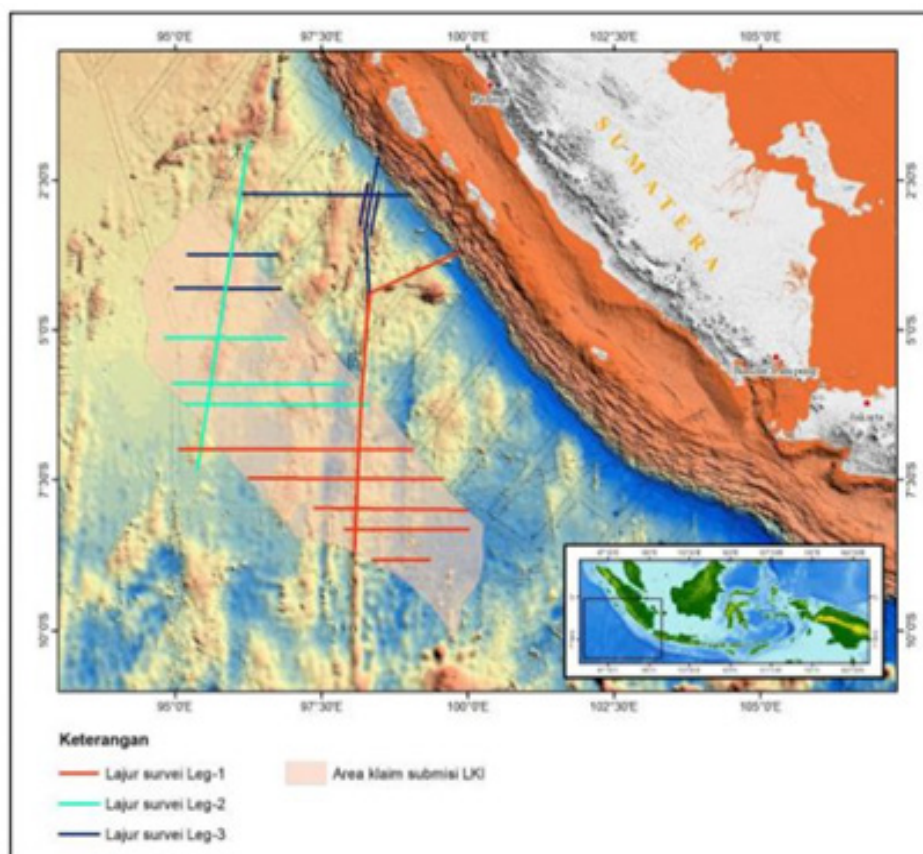
BIG melaksanakan survei landas kontinen untuk mengidentifikasi area landas di luar batas 200 mil laut (NM) wilayah barat Sumatera. Survei ini bertujuan untuk menyiapkan data primer berupa data batimetri sebagai bahan verifikasi dan pendukung data - dalam hal pengajuan perluasan wilayah. Tujuan lainnya yaitu, mempersiapkan data batimetri untuk menentukan batas penambahan luas wilayah Landas Kontinen.

Landas Kontinen ditentukan dengan menggunakan metode Herdberg Formula, yaitu dengan pembuktian bahwa daratan Sumatera mengalami perpanjangan alamiah (natural prolongation) hingga ke Investigator Ridge di Samudera Hindia.

INDONESIAN CONTINENTAL SHELF SURVEY

BIG conducts a continental shelf survey to identify the take-off area beyond the 200 nautical miles (NM) boundary of the western region of Sumatera. This survey aims to prepare primary data in the form of bathymetric data as a material for verification and data support – in the case of proposals for area expansion. Another objective is to prepare bathymetric data to determine the limit for the Continental Shelf area.

The continental shelf is determined using the Herdberg Formula method by proving that the Sumatera mainland has a natural prolongation to the Investigator Ridge in the Indian Ocean.



Area Survei/Survey Area

DELINEASI DAN SINKRONISASI BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF

BIG melaksanakan kegiatan Delineasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik pada 21 segmen batas, meliputi wilayah Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini menghasilkan peta batas hasil delineasi yang menyajikan hasil kajian BIG dari data dan dokumen terkait batas yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah. Terdapat 21 peta yang menyajikan 21 segmen batas antar kabupaten/kota.

DELINEATION AND SYNCHRONIZATION OF ADMINISTRATIVE BOUNDARIES

BIG carries out Cartometric District/City Administrative Boundary Delineation activities in 21 boundary segments, covering Riau Province, South Sumatera Province, and Southeast Sulawesi Province. This activity produces a delineated boundary map that presents the results of BIG's study of data and documents related to boundaries submitted by the Regional Government. Twenty-one maps offer 21 boundary segments between districts/cities.

KESEPAKATAN TEKNIS BATAS DESA/ KELURAHAN

Kegiatan kesepakatan teknis pada 2020 dilakukan di empat wilayah yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Jombang, dengan total lokasi kegiatan sebanyak 209 desa/kelurahan. Total jumlah segmen batas desa/kelurahan yang dihasilkan pada tahun anggaran 2020 berjumlah 609 segmen batas dengan rincian 604 segmen batas yang telah disepakati dan 5 segmen batas belum disepakati.

TECHNICAL AGREEMENT ON VILLAGE BOUNDARIES

The technical agreement activities in 2020 are carried out in four regions, namely Bekasi City, Banjar Negara District, Kuningan District, and Jombang District, with 209 villages/subdistricts. The total number of villages/subdistrict boundary segments produced in the 2020 fiscal year amounted to 609 boundary segments with 604 agreed boundary segments and five not yet settled.

STATUS PERUNDINGAN BATAS NEGARA

a. Batas Negara Darat Indonesia – Malaysia

Ada beberapa batas wilayah Indonesia – Malaysia yang bermasalah yang disebut sebagai Outstanding Boundary Problem (OBP). OBP ini dibagi menjadi dua sektor yakni sektor barat dan sektor timur.

OBP sektor barat terdapat empat wilayah yakni Gunung Raya, Sungai Buan, Batu Alun dan Titik D400. Untuk OBP sektor timur terdapat lima wilayah yakni Sinapad dan Sesai, Simantipal, Sebatik, C500-C600 dan B2700-B3100. Dari lima segmen di sektor timur, dua segmen telah selesai yaitu C500 – C600 dan OBP segment Sungai Simantipal. Sedangkan tiga lainnya masih dalam proses penyelesaian.

STATE BOUNDARY NEGOTIATIONS STATUS

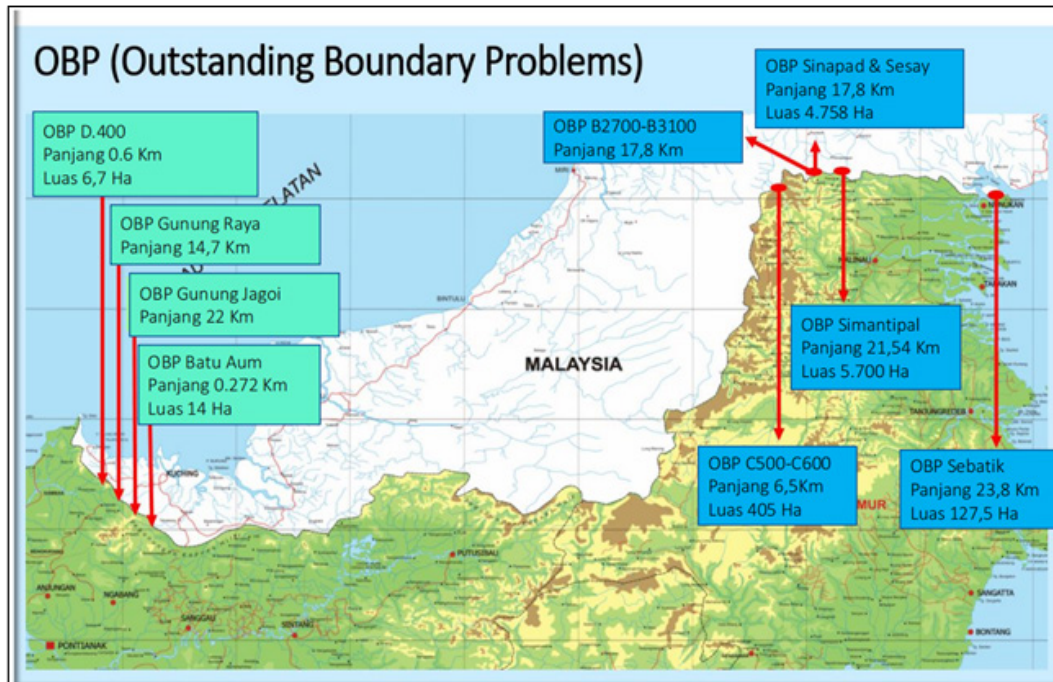
a. INDONESIA – MALAYSIA LAND BOUNDARY

There are several problematic boundaries between Indonesia and Malaysia, known as the Outstanding Boundary Problem (OBP). This OBP is divided into two sectors, namely the western sector and the eastern sector.

For OBP in the western sector, there are four areas, which are Gunung Raya, Sungai Buan, Batu Alun and Point D400. There are five regions for OBP in the eastern sector: Sinapad and Sesai, Simantipal, Sebatik, C500-C600, and B2700-B3100. Of the five segments in the east sector, two segments have been completed, i.e., C500-C600 and the OBP for the Simantipal River segment. Meanwhile, the other three are still in the process of being finalized.

OBP sektor barat terdapat empat wilayah yakni Gunung Raya, Sungai Buan, Batu Alun dan Titik D400. Untuk OBP sektor timur terdapat lima wilayah yakni Sinapad dan Sesai, Simantipal, Sebatik, C500-C600 dan B2700-B3100. Dari lima segmen di sektor timur, dua segmen telah selesai yaitu C500 – C600 dan OBP segment Sungai Simantipal. Sedangkan tiga lainnya masih dalam proses penyelesaian.

For OBP in the western sector, there are four areas, which are Gunung Raya, Sungai Buan, Batu Alun and Point D400. There are five regions for OBP in the eastern sector: Sinapad and Sesai, Simantipal, Sebatik, C500-C600, and B2700-B3100. Of the five segments in the east sector, two segments have been completed, i.e., C500-C600 and the OBP for the Simantipal River segment. Meanwhile, the other three are still in the process of being finalized.



OBP RI – Malaysia

b. Batas Negara Darat Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste

Sejak Timor Leste merdeka, Indonesia dan Timor Leste bersepakat untuk melaksanakan kerja sama menyelesaikan permasalahan batas negara darat. Salah satunya adalah dengan melaksanakan program demarkasi bersama. Hingga 2021, sudah lebih dari 1215 pilar RI – Timor Leste yang terpasang.

Kegiatan pemetaan batas Negara juga dilakukan melalui Joint Border Mapping (JBM) dengan skala 1:25.000 dengan hasil 23 Nomor Lembar Peta (NLP) yang selesai dilaksanakan pada 2014. Publikasi kegiatan tersebut masih menunggu kesepakatan kedua negara.

b. INDONESIA – REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR LESTE LAND BOUNDARY

Since Timor Leste became independent, Indonesia and Timor Leste have agreed to resolve land boundary problems. One of them is by implementing a joint demarcation program. Until 2021, more than 1215 pillars of Indonesia - Timor Leste have been installed.

State boundary mapping activities are also carried out through Joint Border Mapping (JBM) with a scale of 1:25,000 with 23 Map Sheet Numbers (NLP) which were completed in 2014. The publication of these activities is still awaiting agreement between the two countries.



Lokasi Pemasangan Pilar Indonesia - Timor Leste/
Indonesia-Timor Leste Pillar Installation Locations

c. Batas Negara Darat Indonesia – Papua New Guinea (PNG)

Sejak 2015 hingga 2020, Indonesia dan Papua New Guinea telah memasang 85 pilar densifikasi dengan spasi per satu kilometer yang diukur dengan metode *Global Navigation Satellite System* (GNSS). Pengukuran pilar-pilar densifikasi batas kedua negara mengikuti ToR dan SOP Densifikasi yang telah disepakati.

Selain kegiatan survei, adapun kegiatan pemetaan batas negara RI-PNG yang disebut dengan *Joint Border Mapping* (JBM) RI-PNG. Pemetaan JBM RI-PNG Skala 1:50.000 sebanyak 27 Nomor Lembar Peta (NLP) telah selesai dilaksanakan dan dipublikasi pada tahun 2010.

c. INDONESIA – PAPUA NEW GUINEA (PNG) LAND BOUNDARY

From 2015 to 2020, Indonesia and Papua New Guinea have installed 85 densification pillars per one-kilometer spacing as measured by the *Global Navigation Satellite System* (GNSS) method. Measurement of the densification pillar boundary between the two countries follows the Densification ToR and SOP agreed upon.

Apart from survey activities, there is also INA-PNG boundary mapping activity called *INA-PNG Joint Border Mapping* (JBM). The number of 27 Map Sheet Numbers (NLP) of the INA-PNG 1:50,000 scale *Joint Border Mapping* (JBM) was completed and published in 2010.



Lokasi Densifikasi Pilar Indonesia - Papua New Guinea
/Locations of INA-PNG Pillars Densification

Batas Negara Laut

Indonesia berbatasan laut dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), Timor-Leste (RDTL) dan Australia. Batas laut ada beberapa jenisnya berdasarkan zona batas maritim yang tertera pada UNCLOS 1982.

Pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Teknis Perbatasan Maritim sepanjang tahun 2020 meliputi pertemuan teknis pada berbagai tingkatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara tetangga.

SEA BOUNDARIES

Indonesia has ten sea boundaries: India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapore, Philippines, Palau, Papua New Guinea (PNG), Timor Leste (RDTL), and Australia. There are several types of sea boundaries based on the maritime boundary zone stated in the 1982 UNCLCS.

The implementation of the Maritime Border Technical Agreement activities throughout 2020 includes technical meetings at various levels between the Government of Indonesia and neighboring countries' governments.

No	Perundingan /Agreements	Tanggal /Date	Segmen Batas / Boundary Segments	Hasil /Results
1	<i>CONTINENTAL SHELF SUBMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA PARTIAL SUBMISSION WITH RESPECT TO THE AREA OF NORTH OF PAPUA</i>	4 Maret 2020	Landas Kontinen di luar 200 mil laut di utara Papua	<i>Dokumen Partial Submission with Respect to The Area of North of Papua di hadapan Komite Landas Kontinen PBB (UN CLCS)</i>
2	<i>INFORMAL INTERSESSIONAL TECHNICAL CONSULTATION MEETING ON MARITIME BOUNDARIES DELIMITATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND MALAYSIA, dilanjutkan dengan THE INTERSESSIONAL TECHNICAL WORKING GROUP MEETING ON MARITIME BOUNDARIES DELIMITATION BETWEEN MALAYSIA AND THE REPUBLIC OF INDONESIA</i>	12 Juni 2020 dan 6 Juli 2020	Batas Laut Teritorial Indonesia-Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan	Notes of Discussion (NOD) <i>The Intersessional Technical Working Group Meeting On Maritime Boundaries Delimitation Between Malaysia and The Republic of Indonesia</i>
3	<i>THE TECHNICAL WORKING GROUP MEETING ON MARITIME BOUNDARIES DELIMITATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF PALAU</i>	4 dan 18 Juni 2020	Batas maritim Indonesia-Palau di segmen barat laut	Notes of Discussion (NOD) <i>The Technical Working Group Meeting on Maritime Boundaries Delimitation between The Republic of Indonesia and The Republic of Palau</i>
4	<i>THE 37TH TECHNICAL MEETING ON MARITIME BOUNDARIES DELIMITATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND MALAYSIA</i>	19-20 November 2020	Batas Laut Teritorial Indonesia-Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan	Records of Discussion (ROD) <i>The 37th Technical Meeting on Maritime Boundaries Delimitation between The Republic of Indonesia and Malaysia</i>

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

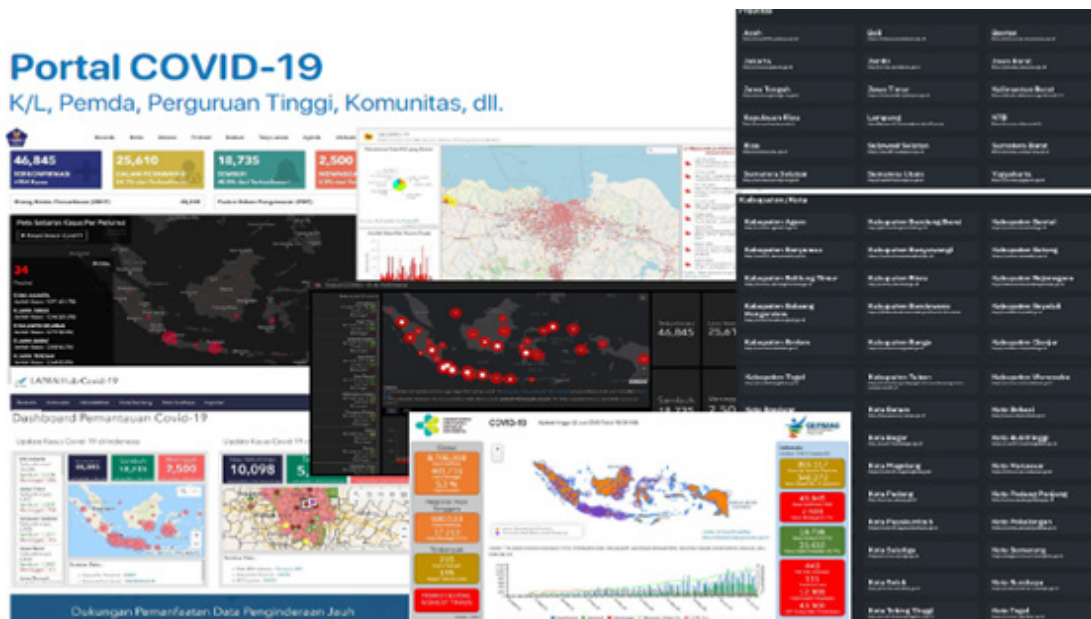
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THEMATIC GEOSPATIAL INFORMATION

PEMETAAN CEPAT KEBENCANAAN

Pemetaan cepat yang dilaksanakan/Conducted Rapid Mapping in 2020: 2, banjir dan longsor di Kabupaten Bogor/ floods and landslides in Bogor, pemetaan bencana pandemi yang dapat diakses pada portal covid19 BIG.

DISASTER RAPID MAPPING

mapping of Covid19 pandemic which can be accessed through BIG's portal of covid19



Gambar Hasil Kegiatan Pemetaan Bencana Pandemi Covid melalui Portal Covid BIG/
Picture of the Results of the Covid Pandemic Disaster Mapping Activity through the BIG Covid Portal

KOMPILASI DAN INTEGRASI KEBIJAKAN SATU PETA

COMPILATION AND INTEGRATION OF ONE MAP POLICY

Monitoring dan Integrasi IGT dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta



Follow-up

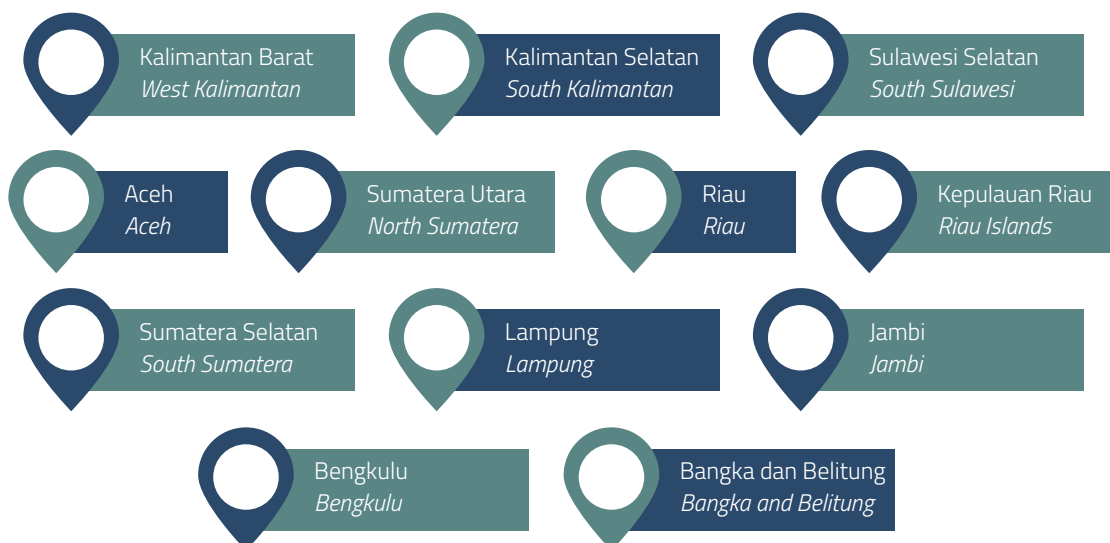
It requires the Data Guardian Ministry/Institution's commitment to accelerating the Compilation and Integration of Thematic Geospatial Information (IGT) on each island. Also, the integrated data needs to be updated immediately.

VERIFIKASI LAHAN BAKU SAWAH

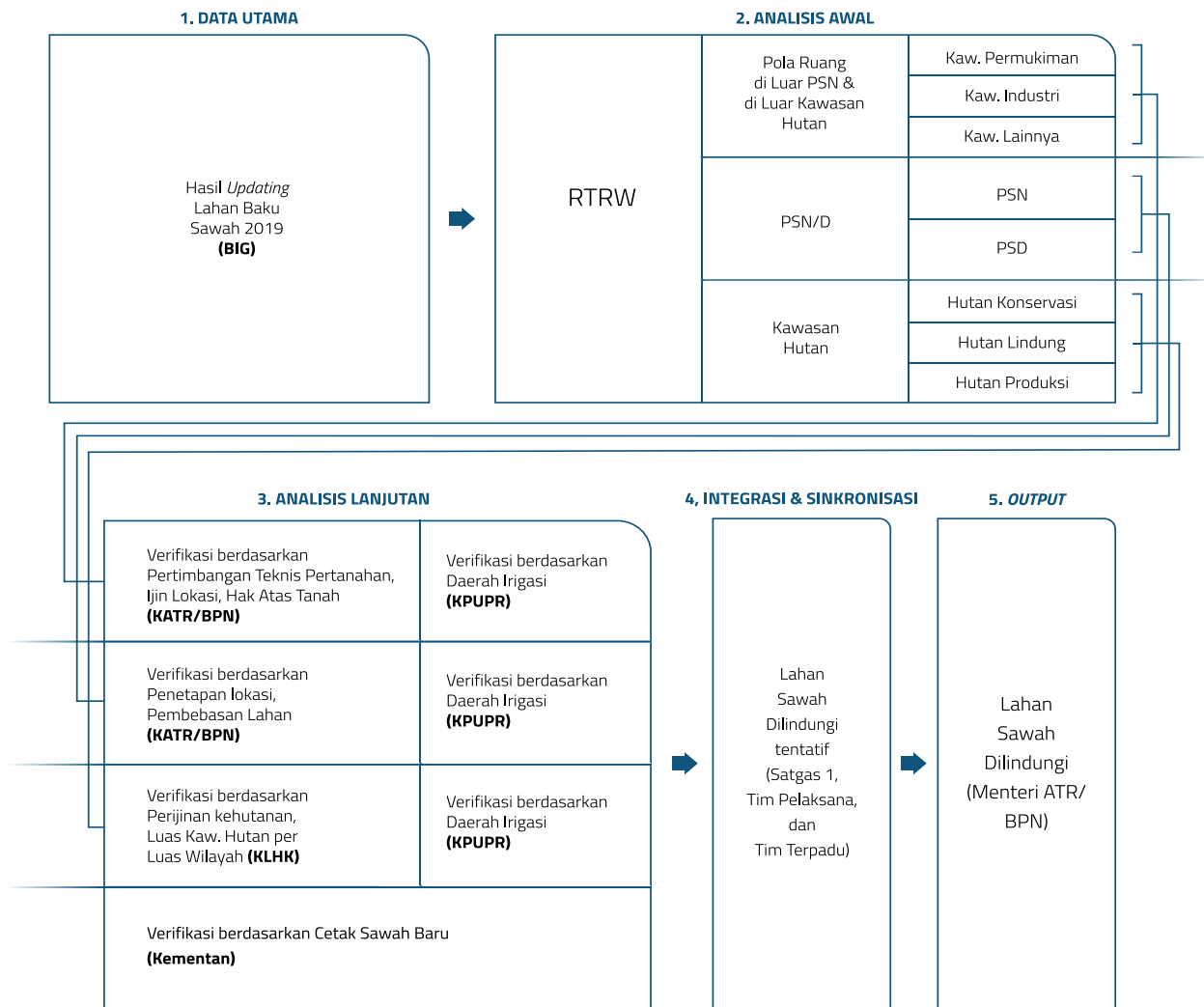
VERIFICATION OF RICE FIELDS

Lokasi verifikasi lahan baku sawah pada 2020

Location of verification of rice fields in 2020:



ALUR PENYUSUNAN PETA LAHAN SAWAH DILINDUNGI



Gambar Flow Chart Sinkronisasi Lahan Sawah Dilindungi/
Flow Chart of Synchronization of protected rice fields

ATLAS DAN PEMETAAN SOSIAL

BIG telah menyelesaikan target empat atlas yang dicanangkan pada 2020. Empat atlas itu antara lain: Atlas Kewilayahan berupa Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunung Api Jawa bagian Barat, Atlas Geospasial Indonesia, Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Atlas Taktual.

ATLAS AND SOCIAL MAPPING

BIG has completed the target of four atlases proclaimed in 2020. The four atlases include Territorial Atlas in the form of Volcanic Land Resources Landscape of West Java, Indonesian Geospatial Atlas, Atlas of Sustainable Development Goals Indicator, and Tactual Atlas.

PEMETAAN DINAMIKA SUMBERDAYA

1. Lima peta neraca sumber aya alam
2. Empat peta neraca sumber daya alam untuk mendukung kajian lingkungan hidup strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Prototipe Pemetaan Indikator SDGs Level Desa
4. Kolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Monitor indikator SDGs untuk tujuan tanpa kemiskinan dan tujuan kehidupan sehat dan sejahtera.

RESOURCES DYNAMICS MAPPING

1. *Five Natural Resources Balance Maps*
2. *Four Natural Resources Balance Maps to support the Strategic Environmental Assessment of the Regional Medium-Term Development Plan*
3. *Prototype Mapping Activities for ADGs Indicator at Village Level*
4. *Collaboration with the National Population and Family Planning Board (BKKBN) to monitor SDGs indicator related to the goal of No Poverty and the goal of Healthy and Prosperous Life.*

PEMETAAN TATA RUANG

1. Bantuan Teknis Percepatan Penyelesaian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
 - a. 30 Daerah untuk pembuatan peta RTRW
 - b. 80 daerah untuk pembuatan RDTR.
2. Kajian
 - a. Kajian Analisis Spasial untuk aspek fisik dan lingkungan dalam penyusunan rencana tata ruang
 - b. Kajian pemanfaatan drone untuk evaluasi dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk RDTR

SPATIAL MAPPING

1. *Technical Assistance for the Acceleration of Completion of Regional Spatial Planning Maps (RTRW) and Detailed Spatial Plans (RDTR)*
 - a. *30 RTRW maps*
 - b. *80 RDTR maps*
2. *Studies*
 - a. *Spatial Analysis Study for Physical and Environmental Aspects in Spatial Planning Compilation*
 - b. *Study on Drone Utilizaion for Evaluation and Control of Space Utilization for RDTR*

PENYEDIAAN DAN OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

PROVISION AND OPTIMIZATION OF GEOSPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE

PELAKSANAAN MANAJEMEN KUALITAS DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

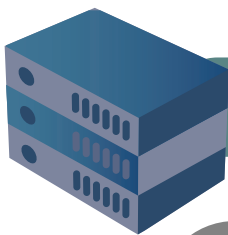
1. 55 Paket pekerjaan penjaminan kualitas
2. Pembaruan aplikasi sistem penjaminan kualitas (SIPENTAS):
 - a. Penambahan peran rangkap admin sebagai user quality control
 - b. Fitur manajemen pengguna
 - c. Admin di unit produksi
 - d. Notifikasi untuk user

QUALITY MANAGEMENT IMPLEMENTATION OF GEOSPATIAL DATA AND INFORMATION

1. 55 packages of implemented quality assurances
2. Updating the quality assurance system application (SIPENTAS)
 - a. Added user quality control role to admin
 - b. User management feature
 - c. Added admin in the production unit
 - d. User notifications

PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR GEOSPASIAL

IMPROVEMENT AND MANAGEMENT OF GEOSPATIAL INFRASTRUCTURE



KAPASITAS DATA CENTER

2019 2020

	2019	2020
	Kecepatan Bandwith - Internasional 500 Mbps - Domestik 1 Gbps	Kecepatan Bandwith - Internasional 550 Mbps - Domestik 1 Gbps
	Sistem Keamanan - CCTV 24/7 - Akses Kontrol - Sistem Pemadam Kebakaran	Sistem Keamanan - CCTV 24/7 - Akses Kontrol - Sistem Pemadam Kebakaran (FSS)
	Kapasitas Server - Fisik: 148 Unit - Virtualisasi: 697 VM - Cloud: 177 SJ	Sistem Keamanan - CCTV 24/7 - Akses Kontrol - Sistem Pemadam Kebakaran (FSS)
	Sistem Penyimpanan - NAS: 4,62 PB (useable 2,31 PB) - SAN: 2,42 PB (useable 1,21 PB)	Sistem Penyimpanan - NAS: RAW 4,58 PB (usable 2,29 PB) - SAN: RAW 2,84 PB (usable 1,42 PB)

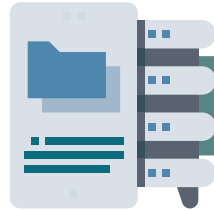
HIGH PERFORMANCE COMPUTER (HPC)

2019

- HPC untuk Orthorektifikasi (pixel factory)
- HPC untuk pasang surut dan ocean modelling
- HPC untuk penelitian IG

2020

- HPC untuk Orthorektifikasi (pixel factory)
- HPC untuk pasang surut dan ocean modelling
- HPC untuk penelitian IG



SISTEM BACKUP

2019

- Disaster Recovery Center (DRC)
- Batam
- Gedung O untuk backup data digital dan analog

2020

- Disaster Recovery Center (DRC)
- Batam
- Gedung O untuk backup data digital dan analog



2019

Terpakai 58%



2020

Terpakai 76%



Total Lisensi 1250



2019

Terpakai 33.6%



Total 527 Simpul Jaringan



2020

Terpakai 43,3%



Total 527 Simpul Jaringan



CAPAIAN QA



Capaian Data Geospasial (DG) Analog

2019

52.414

DG Analog beralih media

DG Analog terkoreksi geometrik pada 2019: 43.253

2020

52.414

DG Analog beralih media

DG Analog terkoreksi geometrik pada 2019: 43.253

Aplikasi Penyebarluasan Informasi Geospasial

2019



Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP)

- Jumlah Akses: **7036**
- Jumlah Download: **18982**



Petakita

- Jumlah Data (pol,loi,aoi): **53.299**
- Jumlah Reg User: **3.869**
- Jumlah Akses: **124.706**



INA-Geoportal

- Jumlah Metadata: **5.633**
- Jumlah Reg User: **95.641**
- Jumlah Akses: : **2.739.275**



PALAPA

Jumlah Simpul Jaringan Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah: **233**

- Palapa-Cloud: **177**
- Palapa Mandiri: **36**
- Non Palapa: **20**

2020



Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP)

- Jumlah Akses: **4986**
- Jumlah Download: **13926**



Petakita

- Jumlah Data : 7639 line | 20388 area | 28690 point Total : **56717**
- Jumlah Reg User : **5.172**
- Jumlah Akses : **137.310**



INA-Geoportal

- Jumlah Metadata: **9.821**
- Jumlah Reg User: **131.718**
- Jumlah Akses: **3.927.393**



PALAPA

Jumlah Simpul Jaringan Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah: **262**

- Palapa-Cloud: **176**
- Palapa Mandiri: **31**
- Non Palapa: **55**





Pembagian Akun Akses Geoportal

2019
Total 522

- ▶ **61 Menteri / Kepala Lembaga**
 - Sudah menerima: 29
 - Belum menerima: 32
- ▶ **514 Bupati / Walikota**
 - Sudah menerima: 463
 - Belum menerima: 51
- ▶ **34 Gubernur**
 - Sudah menerima: 30
 - Belum menerima: 4

86%

2020
Total 472

- ▶ **76 Menteri / Kepala Lembaga**
 - Sudah menerima: 31
 - Belum menerima: 45
- ▶ **514 Bupati / Walikota**
 - Sudah menerima: 410
 - Belum menerima: 104
- ▶ **34 Gubernur**
 - Sudah menerima: 31
 - Belum menerima: 3

75%

Geoportals Kebijakan Satu Peta (KSP)



DAFTAR NSPK PROFESI DAN INDUSTRI BIDANG IG YANG DIHASILKAN

No	Judul NSPK Profesi dan Industri Bidang IG
1.	Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNl) Bidang Informasi Geospasial
2.	Pengemasan Unit Kompetensi dan Kemungkinan Jabatan dalam KKNl di Bidang Informasi Geospasial
3.	Persyaratan Uji Peserta Sertifikasi Tenaga Profesional di Bidang Informasi Geospasial
4.	Metode Audit dan/atau Inspeksi Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial

RANCANGAN REGULASI STANDAR BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL = 3 PERATURAN

Daftar RaperBIG terkait Standar Penyelenggaraan Bidang IG yang dihasilkan

No	Judul Rancangan Peraturan BIG terkait Standar Penyelenggaraan IG
1.	Keputusan Kepala BIG tentang Standar Produsen dan Wali Data pada Badan Informasi Geospasial
2.	Rancangan Peraturan tentang Standar Spesifikasi Produk Data Garis Pantai
3.	Surat Edaran Plt. Kepala BIG tentang Standar Satuan Harga Penyelenggaraan IG Tahun Anggaran 2021
4.	Rancangan Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Atlas

RANCANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL = 3 SNI

Daftar SNI Bidang IG yang dihasilkan

No	Kode SNI	Judul Standar
1.	SNI 7717:2020	Spesifikasi Informasi Geospasial – Mangrove Skala 1:25.000 dan 1:50.000
2.	SNI 8929:2020	Spesifikasi Penyajian Peta Prakiraan Daerah Penangkap Ikan
3.	SNI 8930:2020	Pengolahan Data Penginderaan Jauh – Deteksi Area Terbakar dengan menggunakan Citra Optik Resolusi Menengah
4.	RASNI:2020	Pengolahan data penginderaan jauh - Koreksi geometrik data penginderaan jauh citra satelit resolusi tinggi*

**) Perumusan standar terkait pengolahan penginderaan jauh yang diusulkan oleh LAPAN menggunakan anggaran LAPAN.*

PPIIG TERBINA

No	Nama PPIIG	No	Nama PPIIG
1.	PPIIG Universitas Cendrawasih*	13.	PPIDS Universitas Sam Ratulangi
2.	PPIIG Universitas Jambi	14.	PPIDS Universitas Hasanudin
3.	PPIIG Universitas Tandulako	15.	PPIDS Universitas Udayana
4.	PPIIG Universitas Riau	16.	PPIDS Universitas Diponegoro
5.	PPIDS Universitas Papua	17.	PPIIG Universitas Tanjung Pura
6.	PPIDS Universitas Pattimura	18.	PPIDS Universitas Lambung Mangkurat
7.	PPIDS Universitas Sumatera Utara	19.	PPIDS Universitas Gadjah Mada
8.	PPIDS Universitas Bangka Belitung	20.	PPIDS Universitas Syiah Kuala
9.	PPIDS Universitas Gorontalo	21.	PPIDS Universitas Mulawarman
10.	PPIDS Universitas Sriwijaya	22.	PPIDS Universitas Negeri Padang
11.	PPIDS Universitas Lampung	23.	PPIDS Institut Teknologi Sepuluh Nopember
12.	PPIDS Universitas Halu Oleo	24.	PPIDS Institut Teknologi Bandung



Simpul Jaringan Informasi Geospasial dibina





TATA KELOLA ORGANISASI

*ORGANIZATIONAL
GOVERNANCE*

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Badan Informasi Geospasial menindaklanjuti temuan pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dari tahun anggaran 2006 – 2020. Terdapat berbagai temuan yang masuk ke dalam 389 rekomendasi.

Hingga tahun anggaran 2020. BIG telah menyelesaikan 343 rekomendasi (88,18%), masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 42 rekomendasi (10,8%), dan belum ditindaklanjuti sebanyak empat rekomendasi (1,03%).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses integral dan berkelanjutan sebagai bentuk pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi. Selama 2020, beberapa kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan SPIP antara lain:

1. Pergantian personel satgas SPIP
2. Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Satgas SPIP
3. Paparan Hasil Identifikasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
4. *Self assessment* Penilaian Maturitas SPIP

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Berdasarkan rekapitulasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BIG, hingga Desember 2020, terdapat empat pelaporan gratifikasi dengan status penetapan sebagai berikut:

1. Satu pelaporan gratifikasi telah ditetapkan status penetapan menjadi Milik Negara Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Dua pelaporan gratifikasi berupa makanan yang telah diproses oleh UPG sebagai bantuan sosial.
3. Satu pelaporan gratifikasi yang masih dalam proses penetapan status oleh KPK di mana penetapan status menjadi Barang Milik Negara telah diterbitkan pada Januari 2021.

BIG juga merevisi Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, serta mengesahkan pedoman baru yaitu Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

BIG has followed up on the findings of financial report audits and audits with specific objectives from the 2006 - 2020 fiscal year. There were various findings included in 389 recommendations.

Until the 2020 fiscal year, BIG has completed 343 recommendations (88.18%), 42 suggestions are still in the process of follow-up (10.8%), and four recommendations have not been followed up (1.03%).

The Government Internal Control System is an integral and continuous process as a form of control to achieve organizational goals. During 2020, several activities to support the implementation of SPIP include:

1. *Change of SPIP task force personnel*
2. *Workshop on Human Resource Capacity Building for SPIP Task Force*
3. *Exposure to the Results of Risk Identification and Control Action Plan (RTP)*
4. *Self-assessment of SPIP Maturity Assessment*

CONTROL OF GRATIFICATION

BIG has followed up on the findings of financial report audits and audits with specific objectives from the 2006 - 2020 fiscal year. There were various findings included in 389 recommendations.

1. *One gratification report has been assigned the stipulation status to be State Owned Based on the Decree of the Corruption Eradication Commission (KPK) leadership.*
2. *Two gratification reports in the form of food that the UPG has processed as social assistance.*
3. *One gratification report that is still in determining the status by the KPK in which the status determination as State Property has been issued in January 2021.*

BIG also revised the Regulation of the Head of the Geospatial Information Agency Number 8 of 2016 concerning Guidelines for Gratification Control and ratified new guidelines, namely the Geospatial Information Agency Regulation Number 3 of 2020 Guidelines for Gratification Control.

NILAI REFORMASI BIROKRASI

Dari waktu ke waktu, nilai reformasi birokrasi yang diraih BIG selalu mengalami kenaikan. Pada 2018, indeks reformasi birokrasi BIG adalah 68,60. Pada tahun berikutnya indeks tersebut meningkat menjadi 70,20.

Pada 2020 berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), nilai yang diperoleh BIG mencapai 74,84. Nilai tersebut merupakan hasil penilaian asesor internal BIG dengan penilaian independen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi BIG pada 2020.

Adapun, nilai yang diperoleh dari penilaian mandiri turun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 85,28. Penurunan disebabkan adanya penyempurnaan PMPRB 2.0 ke PMPRB 2.5. Secara garis besar objek penilaian bukan hanya instansi pemerintah saja, namun juga melingkupi unit kerja (termasuk unit kerja eselon I). Sedangkan survey dilakukan tidak sebatas internal organisasi, tetapi juga mencakup integritas organisasi dan integritas jabatan.

Pada PMPRB 2.0 pengungkit hanya melihat proses. Sedangkan untuk PMPRB 2.5 pengungkit terdiri dari pemenuhan antara hasil dan reform. Bobot pemenuhan yang sebelumnya 60%, pada PMPRB Tahun 2020 hanya 40%.

PELAYANAN PUBLIK

BIG telah memiliki Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial (PTIG) yang memberikan layanan prima bagi pengguna data dan informasi geospasial. Unit tersebut melayani dua jenis layanan, yakni layanan jasa dan layanan produk.

Sepanjang 2020, BIG melaksanakan layanan jasa sebanyak 85 kali, terdiri dari 35 layanan penyelenggaraan informasi geospasial dasar, 20 layanan kerja sama, 10 layanan informasi geospasial tematik, 9 kali permohonan tenaga ahli/narasumber, 7 layanan simpul jaringan informasi geospasial nasional, serta 4 layanan permohonan izin dan konsultasi.

BUREAUCRACY REFORMS

From time to time, the value of bureaucratic reform achieved by BIG has continuously increased. In 2018, BIG's bureaucratic reform index was 68.60. In the following year, the index rose to 70.20.

In 2020 based on the Independent Assessment of the Implementation of Bureaucratic Reform (PMPRB), BIG's score reached 74.84. This value results from the assessment of BIG's internal assessors with an independent evaluation of BIG's bureaucratic reform implementation in 2020.

Meanwhile, the value obtained from the self-assessment decreased when compared to 2019 of 85.28. The decline was due to the improvement of PMPRB 2.0 to PMPRB 2.5. The assessment object is not only government agencies but also covers work units (including echelon I). Meanwhile, the survey is not limited to internal organizations but also includes organizational and position integrity.

In PMPRB 2.0, the levers look only at the process. Meanwhile, for PMPRB 2.5, levers consist of the fulfillment of the results and the reforms. The weight of completion previously was 60%; in 2020, it was only 40%.

PUBLIC SERVICES

BIG already has an Integrated Geospatial Information Service (PTIG) that provides excellent service for geospatial data and information users. The unit serves two types of services, namely services and product services.

Throughout 2020, BIG implemented services as many as 85 times, consisting of 35 basic geospatial information services, 20 cooperation services, ten thematic geospatial information services, nine requests for experts, seven national geospatial information network node services, and four services of permit and consultation.



Sementara untuk layanan produk, tercatat ada 2,709 permintaan pada 2020. Dari jumlah tersebut BIG mampu memenuhi sebanyak 2,593 layanan (95.17%).

Meanwhile, for product services, there were 2,709 requests in 2020. Of these, BIG was able to fulfill 2,593 services (95.17%).

BIG melaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilaksanakan. Pada 2020, indeks kepuasan masyarakat BIG berada di angka 3,61 pada skala 1-4. Angka tersebut meningkat dari indeks kepuasan masyarakat pada 2019 di angka 3,34. Berdasarkan kategori yang dibuat oleh Kemenpan RB, angka tersebut berada pada internal mutu pelayanan A (sangat baik).

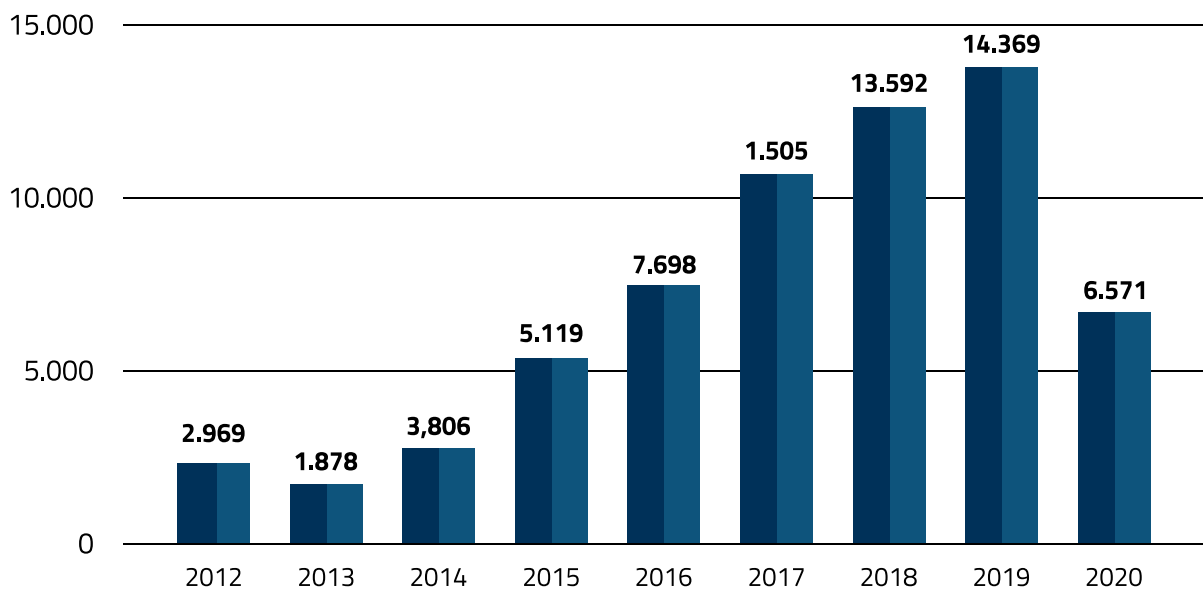
BIG conducts a community satisfaction survey to measure the index of community satisfaction with public services that have been implemented. In 2020, the BIG community satisfaction index stood at 3.61 on a scale of 1-4. This figure has increased from the community satisfaction index in 2019 (3.34). Based on the categories made by Kemenpan RB, this figure on the grade A internal service quality (excellent).

Selain PTIG, pelayanan publik dilaksanakan oleh Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP) yang terletak di Yogyakarta. Sepanjang 2020, PGSP mengalami penurunan kunjungan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan karena dampak pandemi Covid-19. Kendati demikian, Parangtritis Geomaritime Science Park tahun anggaran 2020 masih menghasilkan delapan kegiatan sepanjang tahun, serta monitoring gumuk pasir, dan publikasi.

Apart from PTIG, public services are carried out by Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP), located in Yogyakarta. Throughout 2020, PGSP experienced a decrease in visits compared to previous years. This was due to the impact of the Covid-19 pandemic. However, the Parangtritis Geomaritime Science Park maintained eight activities, sand-dune monitoring, and maintained publications throughout the year.



**Grafik Kunjungan Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP)
Tahun 2012 - 2020**





KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, BIG melaksanakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penyebaran informasi mengenai tugas dan fungsi BIG. Kegiatan yang dimaksud meliputi produksi informasi, penyelenggaraan event, dan pengelolaan penerbitan internal.

a. Produksi informasi

Produksi informasi bertujuan memperkenalkan informasi geospasial kepada masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan data dan informasi geospasial yang dihasilkan oleh BIG. Beberapa saluran yang digunakan untuk menyebarkan informasi yang dihasilkan antara lain melalui website BIG di alamat www.big.go.id dan sosial media: instagram, facebook, twitter, dan youtube.

Pada 2020, BIG mengunggah 37 berita di website BIG. Berita tersebut terdiri dari 15 kluster berita kegiatan kelembagaan, 7 kluster berita reformasi birokrasi, 12 kluster berita seminar/webinar, 1 kluster berita kunjungan, dan 2 kluster berita kerja sama.

DISCLOSURE OF PUBLIC INFORMATION

To carry out the Public Information Disclosure Act mandate, BIG carries out several activities related to the dissemination of information regarding BIG's duties and functions. The actions referred to include the production of information, organizing events, and managing internal publishing.

A. PRODUCTION OF INFORMATION

Information production aims to introduce geospatial information to the public to improve geospatial data and information formed by BIG. Some of the channels used to disseminate the generated information include the BIG website at www.big.go.id and social media: Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube.

In 2020, BIG posted 37 pieces of news on the BIG website. The report consists of 15 news clusters of institutional activities, seven sets of news on bureaucratic reform, 12 groups of news seminars/webinars, 1 cluster of news visits, and 2 clusters of news covering cooperation.

b. Penyelenggaraan event

Sepanjang 2020, BIG telah menyelenggarakan event kampanye dan edukasi publik meliputi konferensi pers, media gathering, diseminasi, pameran, dan penerimaan kunjungan. Tercatat BIG melaksanakan 5 kali konferensi pers untuk beberapa kegiatan antara lain, FGD Pembahasan Akhir Peta RDTR OSS (6 Januari 2020), Kunjungan Menparekraf (20 Februari 2020), Konsensus KKNI (3 Maret 2020), Forum Standardisasi SNI Gambut (3 Maret 2020), dan Bhumandala Award 2020 (27 November 2020).

Selain konferensi pers, kegiatan lainnya yang berkaitan dengan media massa adalah media gathering. Pada 2020 BIG menyelenggarakan media gathering untuk menjelaskan best practices Bhumandala Award yang dihadiri oleh Bupati Bantul, Walikota Manado, dan Pakar Geospasial dari Universitas Gadjah Mada.

Adapun diseminasi yang dilaksanakan pada 2020 mencakup tiga kali penyelenggaraan dengan tema yang berbeda, yaitu Koordinasi dengan Stakeholder (31 Agustus 2020), Peringatan Hari Informasi Geospasial (19 Oktober 2020), dan Layanan Geospasial Prima untuk Tingkatkan Kualitas Bangsa (18 November 2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah mengurangi banyak kegiatan-kegiatan luring. Kegiatan pameran terkena imbasnya. Pada 2020, BIG hanya mengikuti dua kali kegiatan pameran yaitu pada Launching Peta Desa Berbasis Partisipatif di Siak (Februari 2020) dan Pameran Teknologi Virtual Inovasi Indonesia Expo (November 2020) yang diselenggarakan Kementerian Riset dan Teknologi.

Selain pameran, PSBB pun berdampak pada jumlah kunjungan yang diterima oleh BIG. Pada 2020, BIG hanya menerima 14 kunjungan dengan jumlah 946 peserta. Jumlah ini turun drastis dibanding tahun sebelumnya di mana ada 46 kali kunjungan.

B. ORGANIZING EVENTS

Throughout 2020, BIG has organized campaign and public education events, including press conferences, media gatherings, dissemination, exhibitions, and receiving visits. BIG held five press conferences for several activities, including FGD, Final Discussion on the RDTR OSS Map (6 January 2020), the Minister of Tourism and Creative Economy Visit (20 February 2020), the KKNI Consensus (3 March 2020), the Peat SNI Standardization Forum (3 March 2020), and Bhumandala Award 2020 (27 November 2020).

Apart from press conferences, other activities related to the mass media are media gatherings. In 2020 BIG held a media gathering to explain the best practices of the Bhumandala Award, which was attended by the Regent of Bantul, the Mayor of Manado, and Geospatial Experts from Gadjah Mada University.

The dissemination carried out in 2020 includes three events with different themes, namely Coordination with Stakeholders (31 August 2020), Commemoration of Geospatial Information Day (19 October 2020), and Prime Geospatial Services to Improve the Quality of the Nation (18 November 2020).

Large-scale Social Restrictions (PSBB) implemented by the government reduce many offline activities. Exhibition activities were affected. In 2020, BIG only participated in two exhibition activities, namely the Launching of Participatory-Based Village Maps in Siak (February 2020) and the Indonesia Expo Virtual Technology Exhibition (November 2020) held by the Ministry of Research and Technology.

Apart from the exhibition, the PSBB also had an impact on the number of visits BIG received. In 2020, BIG only received 14 visits with a total of 946 participants. This number dropped drastically compared to the previous year where there were 46 visits.

c. Penerbitan

Dibandingkan penyelenggaraan event, penerbitan yang dilakukan BIG dapat mencapai target sesuai yang diharapkan. BIG menerbitkan sejumlah publikasi, antara lain Warta Geospasial, Majalah Geospasial Indonesia, Jurnal Geomatika, dan Jurnal Globe.

Sepanjang 2020, Warta Geospasial berubah format meninggalkan bentuk cetak beralih menjadi digital. Hal tersebut dilakukan mengingat penerapan WFH-WFO di BIG. Warta Geospasial ditujukan untuk kalangan internal sehingga akan lebih efektif jika diterbitkan dalam bentuk digital.

Sementara Majalah Geospasial Indonesia terbit tiga kali pada 2020, dengan rincian sebagai berikut,

- Vol VII No.1 mengangkat tema Dukungan Data Spasial untuk Perencanaan Penanganan Bencana di Indonesia,
- Vol VII No.2 mengangkat tema Dukungan Informasi Geospasial di Era New Normal, dan
- Vol VII No.3 mengangkat tema 51 Tahun Badan Informasi Geospasial.

Jurnal Geomatika terbit seperti sedia kala sebanyak dua kali pada Mei dan November. Jurnal Globe terbit pada April dan Oktober. Kedua jurnal tersebut terakreditasi S2 oleh Kementerian Riset dan Teknologi.

C. PUBLISHING

Compared to organizing an event, BIG's publishing can achieve the target as expected. BIG publishes several publications, including Warta Geospasial, Indonesian Geospasial Magazine, Geomatics Journal, and Globe Journal.

Throughout 2020, Warta Geospasial changed its format, leaving print to be digital. BIG did this considering the implementation of WFH-WFO in BIG. Geospasial Warta is intended for internal circles. To be more effective, BIG decided to publish Warta in digital form.

Meanwhile, the Indonesian Geospasial Magazine was published three times in 2020, with the following details,

- *Vol. VII No.1 with the theme Spatial Data Support for Disaster Management Planning in Indonesia,*
- *Vol. VII No.2 raises the theme of Geospasial Information Support in the New Normal Era, and*
- *Vol. VII No.3 has the theme 51 Years of the Geospasial Information Agency.*

The Geomatics Journal was published twice in May and November. The Journal of Globe was published in April and October. Both journals were accredited S2 by the Ministry of Research and Technology.



KERJA SAMA

Jumlah kerja sama geospasial yang dijalin BIG dengan mitra sepanjang tahun 2020 berjumlah 57 dokumen, terdiri dari 30 kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan 27 dokumen kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga, Perguruan Tinggi, BUMN/Swasta. Dokumen yang ditandatangani berupa Kesepahaman Bersama/ Nota Kesepahaman (MoU) sebanyak 21 dokumen, Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Kontrak Kerja Sama yang merupakan dokumen lanjutan dari PKS sebanyak 36 dokumen.

Dokumen MoU pada umumnya menyepakati tentang "Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial". Sedangkan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat meliputi berbagai bidang kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi BIG.

Jumlah PKS pada tahun 2020 berdasarkan bidang kerja samanya disajikan pada Gambar 1.

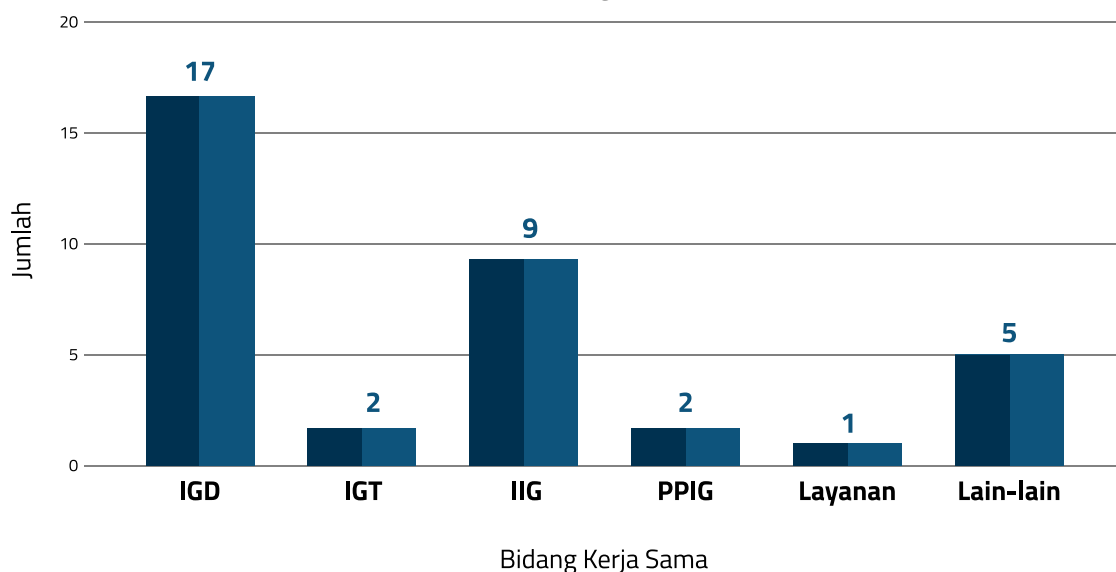
Partnerships

The number of geospatial collaborations that BIG has made with partners throughout 2020 totaled 57 documents, consisting of 30 partnerships with local governments and 27 partnerships with Ministries / Institutions, Universities, BUMN / Private. The signed documents are 21 documents of Mutual Understanding / Memorandum of Understanding (MoU) and 36 documents of Partnership Agreement (PKS) and Partnership Contracts.

The MoU document generally agrees on "Implementation, Development, and Utilization of Geospatial Data and Information." Meanwhile, the Partnerships Agreement made covers various fields of cooperation following BIG's duties and functions.

The number of PKS in 2020 based on the field of partnerships is presented in Figure 1.

Gambar 1./Figure 1.



Keterangan:

- IGD : Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
- IGT : Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik
- IIG : Penyelenggaraan Infrastruktur Informasi Geospasial
- PPIIG : Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial
- Layanan : Pendidikan dan Pelatihan
- Lain-lain : Penelitian, layanan/Jasa pihak ketiga, karyasiswa

Bidang kerja sama paling banyak dijalin pada tahun 2020 adalah dalam penyelenggaraan informasi geospasial dasar (IGD). Kegiatan ini sejalan dengan amanat program pemerintah tentang percepatan penyelenggaraan peta dasar skala 1:5.000. Koperasi bidang ini paling banyak dilakukan Bersama mitra Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah semakin menyadari bahwa pembangunan tidak dapat dilaksanakan tanpa Informasi Geospasial. Peta dasar skala besar membantu perencanaan pembangunan dengan lebih baik. Peta tersebut, salah satunya, digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah. Pada akhirnya, RDTR tersebut akan mewujudkan cita-cita banyak Pemerintah Daerah untuk menjadi *Smart City*.

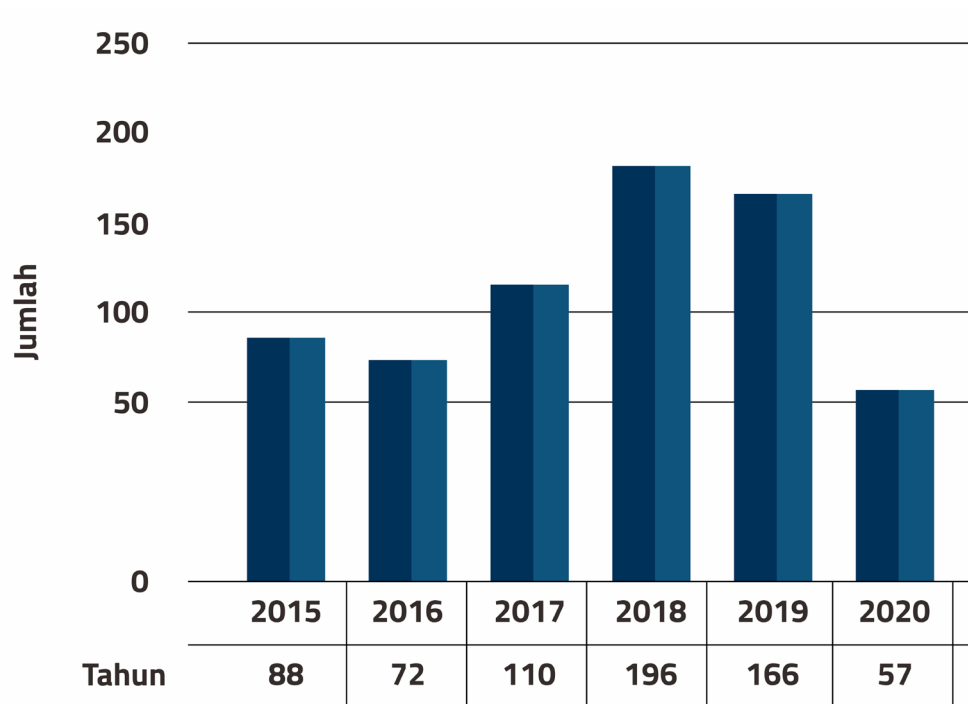
Bidang kerja sama yang juga tertinggi jumlahnya pada tahun 2020 adalah kegiatan dalam penyelenggaraan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG), tepatnya Pengembangan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Pengembangan JIGN telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus terhubung dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagai simpul jaringan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial. Badan Informasi Geospasial selain sebagai simpul jaringan yang sekaligus sebagai penghubung simpul jaringan, perlu melakukan sosialisasi pembangunan simpul jaringan di pusat maupun daerah. JIGN ini sendiri berfungsi sebagai sarana berbagi pakai informasi geospasial dan penyebarluasan informasi geospasial. Selain itu, JIGN juga mendukung terwujudnya Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia.

Jika dibandingkan dengan kerja sama antara BIG dan mitra selama 5 (lima) tahun terakhir, kerja sama tahun 2020 ini tidak lebih banyak dari tahun sebelumnya. Adapun kerja sama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Gambar 2.

The most common areas of cooperation in 2020 are implementing basic geospatial information (IGD). This activity is in line with the government program's mandate regarding the acceleration of the performance of the 1: 5,000 scale base map. Most of the cooperatives in this field are carried out together with local government partners. It indicated that Regional Governments are increasingly aware that development cannot be carried out without Geospatial Information. Large-scale base maps help better development planning. The map, for example, is used in the preparation of the Regional Detailed Spatial Plan (RDTR). In the end, the RDTR will realize the aspirations of many Local Governments to become smart cities.

The areas of partnerships that are also the highest in 2020 are activities in implementing the Geospatial Information Infrastructure (IIG), to be precise, the Development of the National Geospatial Information Network (JIGN) Node. The development of JIGN has been mandated in Presidential Regulation Number 27 of 2014 concerning the National Geospatial Information Network (JIGN). The regulation mandates that all Ministries / Agencies and Local Governments must be connected in the National Geospatial Information Network as a network node. The node provided convenience in sharing and disseminating geospatial information. The Geospatial Information Agency, apart from acting as a network node and connecting network nodes, needs to conduct socialization on the development of network nodes at the central and regional levels. JIGN itself functions as a means of sharing geospatial information and disseminating geospatial information. Besides, JIGN also supports the realization of Indonesia's One Map and One Data Policy.

Compared with the cooperation between BIG and partners in the last five years, the partnership in 2020 is no more than the previous year. The collaboration for the last 5 (five) years is presented in Figure 2.



Gambar 2. Kerja Sama Geospasial 5 (lima) Tahun Terakhir

Jumlah kerja sama yang menurun ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perubahan alokasi anggaran menyebabkan program yang telah direncanakan harus ditunda. Koordinasi juga menjadi lebih sulit pada awal tahun karena perubahan ritme kerja, walaupun pada akhirnya koordinasi dapat dilakukan melalui daring.

Namun demikian, jumlah kerja sama yang menurun ini dapat menjadi keuntungan bagi BIG. BIG, melalui Humas dan Kerja Sama dapat melakukan monitoring dan evaluasi dengan lebih baik. Seperti diketahui bahwa kualitas kerja sama yang baik ditunjukkan dengan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan. Kooperasi yang disepakati harus benar-benar dijalankan sesuai dengan rencana kerja sehingga tujuan Bersama dapat tercapai dengan baik.

Pada tahun 2020, BIG berhasil mengimplementasikan sebanyak 51 dari 57 kerja sama yang dibentuk, atau sebesar 90%. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antara pusat teknis di BIG dan mitra kerja samanya. Namun masih ada beberapa kerja sama yang tidak/belum dilaksanakan, diantaranya disebabkan karena terjadi pengalihan anggaran pada instansi mitra untuk penanganan pandemi Covid-19. Implementasi kerja sama ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

The decreased number of the partnership was due to the Covid-19 pandemic around the world, including Indonesia. Changes in budget allocations cause planned programs to be postponed. Coordination also became more difficult at the start of the year due to changes in work rhythms, although coordination could occur online.


However, this decreasing amount of partnerships could be an advantage for BIG. BIG, through Public Relations and Cooperation, can better monitor and evaluate. As it is known, the excellent quality of partnerships related to the effectiveness of the activities carried out. Stakeholders must carry out the agreed cooperation following the work plan to achieve the Joint goals properly.


In 2020, BIG completed 51 of the 57 partnerships formed or 90%. This success is the result of a collaboration between the technical center at BIG and its partners. However, some cooperations have not been implemented due to the reallocation of partner agencies' budget to overcome the Covid-19 pandemic. The implementation of this cooperation is planned to be carried out in the following year.



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

GEOSPATIAL
INFORMATION
AGENCY

 Jl. Raya Jakarta - Bogor KM 46
Cibinong, 16911, Indonesia

 021-8753155, 021-8752062
Ext. 3608/3611/3103

 info@big.go.id

 www.big.go.id
tanahair.indonesia.go.id